



KERJA PRAKTIK - KS 184721

**DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A
PEKANBARU**

Disusun Oleh :

Muhammad Adlansyah Muda

NRP 062117 4000 0074

Dosen Pembimbing

Dr. Achmad Choiruddin, S.Si., M.Sc

PROGRAM STUDI SARJANA
DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2020



LAPORAN KERJA PRAKTIK

DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PEKANBARU

Disusun Oleh :

Muhammad Adlansyah Muda

NRP 062117 4000 0074

Dosen Pembimbing :

Dr. Achmad Choiruddin, S.Si., M.Sc

**PROGRAM STUDI SARJANA
DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2020**

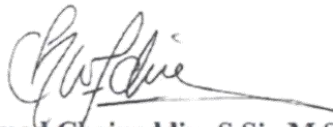
(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LEMBAR PENGESAHAN I
LAPORAN KERJA PRAKTIK
Program Studi Sarjana Departemen Statistika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya, 15 September 2020

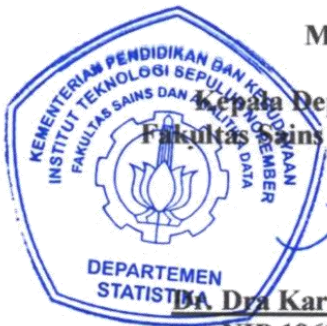
Menyetujui,

Dosen Pembimbing

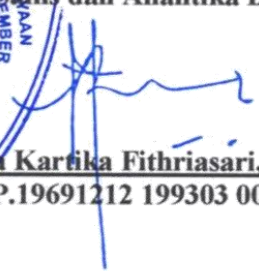


Dr. Achmad Choiruddin, S.Si., M.Sc.
NIP. 19912019 111 01

Mengetahui,



Kepala Departemen Statistika
Fakultas Sains dan Analitika Data ITS



Dra Kartika Fithriasari, M.Si
NIP.19691212 199303 002

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LEMBAR PENGESAHAN II
LAPORAN KERJA PRAKTIK

Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru

Pekanbaru, 15 September 2020

Menyetujui,

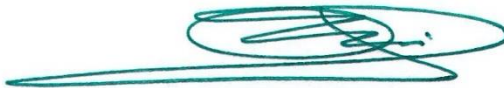
Pembimbing Lapangan



Erry Mardianto, ST., SH.
NIP. 19760301 200502 1 001

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru



Saut Maruli Tua Pasaribu, SH., MH
NIP. 19661019 199212 1001

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan baik.

Kerja praktik ini dilakukan penulis seorang diri dikarenakan pengaruh pandemi COVID-19 di Indonesia, sehingga tidak memungkinkan untuk teman-teman yang berbeda daerah untuk ikut berpartisipasi bersama penulis. Laporan kerja praktik dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dra Kartika Fithriasari, M.Si., selaku Kepala Departemen Statistika Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD) ITS.
2. Ibu Dr. Santi Wulan Purnami, S.Si., M.Si selaku Sekretaris Departemen I.
3. Bapak Dr. Achmad Choiruddin, S.Si., M.Sc., selaku dosen pembimbing kerja praktik Departemen Statistika Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD) ITS.
4. Bapak Saut Maruli Tua Pasaribu, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktik.
5. Bapak Erry Mardianto, ST., SH. selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang telah menjadi pembimbing lapangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.
6. Bapak Syaifullah, SE selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah membantu mengurus surat dan keperluan kerja praktik.

7. Bang Rizki yang telah membimbing penulis dalam mendapatkan data penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.
8. Ibu Monta selaku kepala perpustakaan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menggunakan ruangan untuk menyelesaikan laporan kerja praktik.
9. Mas Nugi yang telah membimbing penulis dalam memberikan informasi terkait perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.
10. Semua Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang telah menyambut dan membantu penulis dalam keberhasilan kegiatan kerja praktik ini.
11. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan telah membantu dalam keberhasilan kegiatan kerja praktik ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalam penulisan dan penyusunan laporan kerja praktik ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca sebagai perbaikan laporan kerja praktik ini. Harapan kami semoga laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis.

Surabaya, 15 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	iii
LEMBAR PENGESAHAN I.....	v
LEMBAR PENGESAHAN II	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	3
1.3 Manfaat	3
1.3.1 Manfaat Bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru	3
1.3.2 Manfaat Bagi Mahasiswa	3
1.3.3 Manfaat Bagi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	3
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	4
2.1 Profil Pengadilan Negeri Pekanbaru	4
2.1 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru	5
2.2 Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru	5
2.3 Struktur Organisasi	6
BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK	7
3.1 Waktu dan Pelaksanaan Kerja Praktik	7
3.2 Metodologi Penyelesaian Permasalahan	7
3.2.1 Sumber Data	7
3.2.2 Variabel Penelitian	8
BAB IV HASIL KERJA PRAKTIK	10
4.1 Karakteristik dan Gambaran Umum Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata Umum, dan Perdata Khusus ..	10
4.1.1 Pidana Umum	10

4.1.2	Pidana Khusus.....	22
4.1.3	Perdata Umum.....	26
4.1.4	Perdata Khusus.....	37
4.2	<i>Dashboard</i> Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru	41
4.2.1	Menu <i>Home</i>	41
4.2.2	Menu Pidana Umum	42
4.2.3	Menu Pidana Khusus	47
4.2.4	Menu Perdata Umum	49
4.2.5	Menu Perdata Khusus	53
BAB V PENUTUP.....		55
5.1	Kesimpulan	55
5.2	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....		57
LAMPIRAN.....		59

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Variabel Penelitian.	8
Tabel 4.1	Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	10
Tabel 4.2	Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	13
Tabel 4.3	Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Cepat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	15
Tabel 4.4	Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	18
Tabel 4.5	Karakteristik Perkara Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	20
Tabel 4.6	Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	22
Tabel 4.7	Karakteristik Lama Proses Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	25
Tabel 4.8	Karakteristik Lama Proses Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	27
Tabel 4.9	Karakteristik Lama Proses Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	30
Tabel 4.10	Karakteristik Lama Proses Perkara Perdata Gugatan Bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	33
Tabel 4.11	Karakteristik Lama Proses Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	35

Tabel 4.12	Karakteristik Lama Proses Perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.....	38
-------------------	--	----

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Lambang Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	4
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.....	6
Gambar 4.1	Jumlah Perkara Pidana Biasa Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	12
Gambar 4.2	Persentase Tahapan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.....	13
Gambar 4.3	Jumlah Perkara Pidana Singkat Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	14
Gambar 4.4	Persentase Tahapan Perkara Pidana Singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.....	15
Gambar 4.5	Jumlah Perkara Pidana Cepat Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	16
Gambar 4.6	Persentase Tahapan Perkara Pidana Cepat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.....	17
Gambar 4.7	Jumlah Perkara Pidana Pra Peradilan Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	19
Gambar 4.8	Persentase Tahapan Perkara Pidana Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.....	20
Gambar 4.9	Sisa Perkara Lalu Lintas Setiap Bulan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari Tahun 2016 Hingga 1 Juli 2020.	21
Gambar 4.10	Jumlah Perkara Pidana Anak Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	23

Gambar 4.11	Persentase Tahapan Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.....	24
Gambar 4.12	Persentase Tahapan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.....	26
Gambar 4.13	Jumlah Perkara Perdata Gugatan Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	28
Gambar 4.14	Persentase Tahapan Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.....	29
Gambar 4.15	Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.	31
Gambar 4.16	Persentase Tahapan Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	32
Gambar 4.17	Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bantahan Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020....	34
Gambar 4.18	Persentase Status Perkara Perdata Gugatan Bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	35
Gambar 4.19	Jumlah Perkara Perdata Permohonan Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	36
Gambar 4.20	Persentase Tahapan Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.....	37
Gambar 4.21	Jumlah Perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020....	39

Gambar 4.22	Persentase Tahapan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.	40
Gambar 4.23	Tampilan Home.	41
Gambar 4.24	Tampilan Sub Menu Pidana Biasa.	42
Gambar 4.25	Tampilan Sub Menu Pidana Singkat.	43
Gambar 4.26	Tampilan Sub Menu Pidana Cepat.	44
Gambar 4.27	Tampilan Sub Menu Pidana Pra Peradilan.	45
Gambar 4.28	Tampilan Sub Menu Perkara Lalu Lintas.	46
Gambar 4.29	Tampilan Sub Menu Pidana Anak.	47
Gambar 4.30	Tampilan Sub Menu Tindak Pidana Korupsi.	48
Gambar 4.31	Tampilan Sub Menu Perdata Gugatan.	49
Gambar 4.32	Tampilan Sub Menu Perdata Gugatan Sederhana.	50
Gambar 4.33	Tampilan Sub Menu Perdata Bantahan.	51
Gambar 4.34	Tampilan Sub Menu Perdata Permohonan.	52
Gambar 4.35	Tampilan Sub Menu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).	53

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penerimaan Kerja Praktik.....	59
Lampiran 2. Lembar Kegiatan Kerja Praktik.	60
Lampiran 3. Lembar Bimbingan Laporan Kerja Praktik.	62

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting terhadap kemajuan suatu negara. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia memungkinkan banyaknya perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan dan meningkatnya persaingan dalam hal kualitas. Kualitas sumber daya manusia dapat terbentuk melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Mahasiswa sebagai titik awal untuk memasuki dunia kerja tidak cukup hanya mengandalkan teori, tetapi juga perlu meningkatkan pemahaman praktik. Dalam mewujudkan hal tersebut, departemen Statistika Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD) ITS sebagai salah satu wadah dalam menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan global mewajibkan mahasiswa yang telah menempuh 100 SKS untuk melaksanakan kerja praktik di berbagai lembaga yang meliputi industri, ekonomi, bisnis, sosial, dan lain-lain.

Kerja praktik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan praktikal dalam keilmuan statistika sehingga dapat lebih memahami penerapan teori di dalam dunia kerja. Ilmu statistika dapat diterapkan dalam hal pengolahan data dan menganalisis suatu data hingga menarik kesimpulan dari data yang disajikan (Walpole, 2012). Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru merupakan salah satu lembaga yang dapat menjadi tujuan kerja praktik bagi mahasiswa Statistika ITS, karena ilmu dan materi yang telah didapatkan mahasiswa bisa diterapkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, salah satunya tentang analisis dan visualisasi data perkara. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Semua data perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru di input dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pekanbaru. Data perkara yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) meliputi perkara pidana umum, pidana khusus, perdata umum, dan perdata khusus. Statistika berperan penting dalam menganalisis data yang disajikan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru sehingga dapat diinformasikan dan menjadi evaluasi kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam pelaksanaan kerja praktik di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, dilakukan analisis dan visualisasi data perkara yang ada di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020 yang ditampilkan dalam bentuk *dashboard* yang interaktif, sehingga mempermudah instansi dalam pemantauan serta pengambilan kebijakan terkait peningkatan pelayanan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.

1.2 Tujuan

Berikut ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus dari pelaksanaan kerja praktik.

1.2.1 Tujuan Umum

Beberapa tujuan umum yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kerja praktik adalah sebagai berikut.

1. Mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja dan mengembangkan pola pikir mahasiswa.
2. Menerapkan ilmu statistika dalam Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, terutama untuk mengidentifikasi dan menganalisa persoalan dengan pendekatan metode statistika.
3. Memberikan pengalaman mengenai sistem kerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, baik dari sisi struktural hingga manajerial.
4. Mahasiswa dapat berpikir kritis, praktis, dan sistematis dalam menghadapi permasalahan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru sehingga dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada.

1.2.2 Tujuan Khusus

Berikut tujuan khusus yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kerja praktik.

1. Mengidentifikasi tingkat pelayanan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru menggunakan metode analisis statistika deskriptif dan analisis eksplorasi data.
2. Membantu memberi masukan dalam pelaksanaan penyajian data dengan membuat program *dashboard* data perkara menggunakan *Shiny R*.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut.

1.3.1 Manfaat Bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru

Manfaat pelaksanaan kerja praktik untuk Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru adalah sebagai berikut.

1. Terjalin kerja sama antara Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan Departemen Statistika ITS Surabaya.
2. Memperoleh masukan dari setiap hasil analisis dan penelitian yang dilakukan.
3. Memberikan kesempatan bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru untuk berpartisipasi dalam pengembangan profesionalisme atau mutu pendidikan.

1.3.2 Manfaat Bagi Mahasiswa

Kerja praktik yang dilakukan dapat memberikan pengalaman baru tentang dunia kerja dan menambah pemahaman dari penerapan ilmu teori statistika dalam bentuk nyata serta mampu mengaplikasikan ilmu statistika di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru secara profesional dengan adaptasi yang telah dilakukan di lingkungan kerja.

1.3.3 Manfaat Bagi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Mampu mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu statistika di lapangan dan menambah referensi (tinjauan pustaka) khususnya mengenai perkembangan statistika yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Profil Pengadilan Negeri Pekanbaru

Gedung Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang sekarang didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 23 Februari 1959 No.J.K. 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat. Gedung tersebut dibangun secara bertahap, bagian muka dibangun sekitar tahun 1959, kemudian dibangun pula bagian samping kanan kira-kira tahun 1962, dibagian samping kiri dibangun tahun 1963, dan terakhir dibangun ruang sidang besar tahun 1968. Lambang Pengadilan Negeri Pekanbaru ditampilkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Lambang Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 7 buah yaitu:

1. Dua ruang sidang utama
2. Empat ruang sidang biasa
3. Satu ruang sidang anak

Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan kehakiman merupakan instansi pemerintah. Sebagai instansi pemerintah menurut instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

2.1 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Visi Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Pekanbaru yang agung.

Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut.

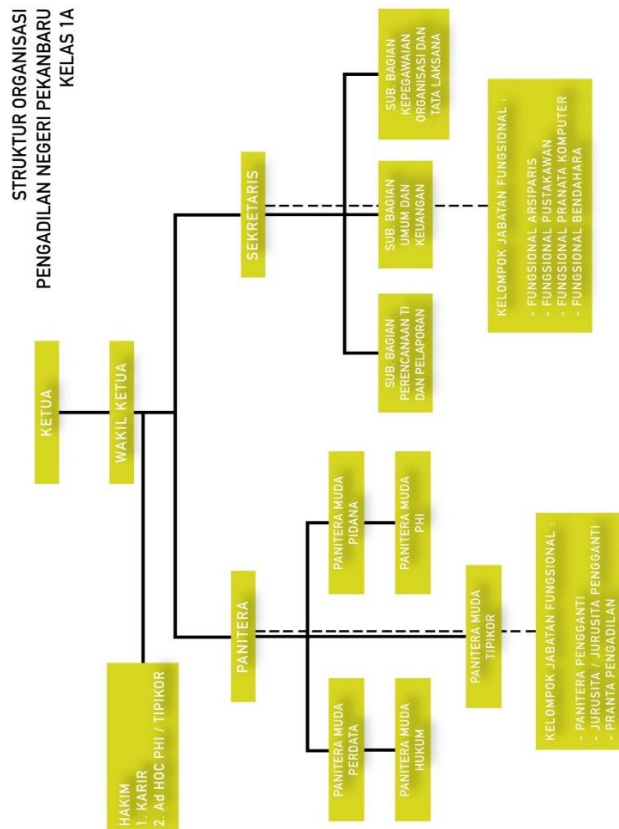
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2.2 Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Kedudukan Pengadilan Negeri Pekanbaru berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tugas pokok Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Pekanbaru berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas Kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan (Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2020).

2.3 Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Pekanbaru dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta Hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya (Pengadilan Negeri Pekanbaru, 2020). Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A ditampilkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

3.1 Waktu dan Pelaksanaan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik dilaksanakan pada Rabu, 1 Juli 2020 sampai dengan Jumat, 31 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Teratai No. 85 Sukajadi Pekanbaru, Riau. Jam kerja di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru pada hari Senin hingga Kamis dimulai pukul 08.00 WIB hingga 16.30 WIB dan pada hari Jumat dimulai pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Secara garis besar, kegiatan kerja praktik di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru terdiri atas pengenalan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, wawasan terkait ilmu hukum, wawasan terkait peran dan tugas hakim, dan mengolah data yang tersedia pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pekanbaru. Peneliti ditempatkan di divisi Kepaniteraan Hukum dimana rincian kegiatan pelaksanaan kerja praktik secara garis besar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.2 Metodologi Penyelesaian Permasalahan

Metode penyelesaian permasalahan dalam kerja praktik di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru menggunakan analisis statistika deskriptif terhadap data lama proses perkara dan melakukan analisis eksplorasi data untuk melihat perbandingan jumlah perkara berdasarkan klasifikasi perkara, persentase tahapan perkara, dan perbandingan lama proses perkara tiap tahun yang disusun dalam bentuk *dashboard* yang interaktif. Hasil statistika deskriptif dan pembuatan *dashboard* tersebut diharapkan dapat mempermudah Pegawai Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru maupun pembaca dalam menginterpretasikan data perkara yang tersedia di SIPP.

3.2.1 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data perkara yang dimulai dari tahun 2013 hingga 1 juli 2020. Dikarenakan SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru mulai beroperasi pada tahun 2013. Sehingga data perkara dibawah tahun 2013 yang tersedia pada SIPP dianggap tidak valid.

3.2.2 Variabel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui *website* Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diakses pada 1 Juli 2020. Data terdiri dari 5 variabel yang dipilih karena tidak bersifat privasi dan merupakan data yang umum untuk dianalisis. Variabel yang digunakan dalam penelitian ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian.

Variabel	Keterangan
X_1	Tanggal Register
X_2	Klasifikasi Perkara
X_3	Tahapan
X_4	Status Perkara
X_5	Lama Proses (Hari Kerja)

3.3 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.3.1 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan bagian dari statistika yang berguna untuk menggambarkan sifat atau karakteristik data. Beberapa bentuk statistika deskriptif yang sering digunakan adalah ukuran-ukuran pemusatan data seperti *mean* dan median, serta ukuran penyebaran data seperti *varians* dan standar deviasi. Statistika deskriptif bisa juga berupa grafik yang mempermudah deskripsi karakteristik data seperti *boxplot*, *histogram*, *bar chart*, dan lain sebagainya (Walpole, 2012).

3.3.2 Bar Chart

Diagram batang (*bar chart*) adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Pada umumnya diagram batang menggambarkan perkembangan nilai-nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan batang-batang tegak, mendatar, dan sama lebar dengan batang-batang terpisah (Wijayanto, 2011).

3.3.3 Histogram

Histogram adalah sebuah grafik batang yang menunjukkan frekuensi data yang memberikan cara yang paling mudah untuk mengevaluasi distribusi data (Hestianto, 2011).

3.3.4 Pie Chart

Pie chart (diagram lingkaran) adalah penyajian data statistik yang dinyatakan dalam persen atau derajat. Kelebihan penggunaan *pie chart* ialah untuk menunjukkan dan membandingkan proporsi data (Meo, et al., 2014).

3.3.5 Box Plot

Box plot (*box and whisker*) merupakan suatu *box* yang berguna untuk menggambarkan suatu data melalui lima ukuran, yaitu; nilai observasi terkecil, kuartil terendah atau kuartil pertama (Q_1), median atau nilai pertengahan (Q_2), kuartil tertinggi atau kuartil ketiga (Q_3), dan nilai observasi terbesar (Putra, 2018).

3.3.6 Dashboard

Dashboard merupakan sebuah tampilan *visual* dari suatu informasi yang digabungkan dan diatur pada sebuah layar, sehingga menjadi informasi yang dibutuhkan dan dapat dilihat secara sekilas. Tujuan dalam penggunaan *dashboard* menurut Eckerson (2006) dalam Hariyanti (2008) ialah mengkomunikasikan strategi, memonitoring dan menyesuaikan pelaksanaan strategi, dan menyampaikan wawasan dan informasi ke semua pihak.

BAB IV

HASIL KERJA PRAKTIK

4.1 Karakteristik dan Gambaran Umum Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata Umum, dan Perdata Khusus

Karakteristik dan gambaran umum pada perkara pidana umum, pidana khusus, perdata umum, dan perdata khusus yang terdapat pada SIPP Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru adalah sebagai berikut.

4.1.1 Pidana Umum

Pidana umum adalah pidana yang dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Perkara pidana umum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pekanbaru terbagi atas lima kelompok, yaitu; pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana pra peradilan, dan perkara lalu lintas. Jumlah perkara pidana umum di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ialah sebesar 138.129 perkara. Adapun karakteristik dan gambaran umum pada tiap kelompok adalah sebagai berikut.

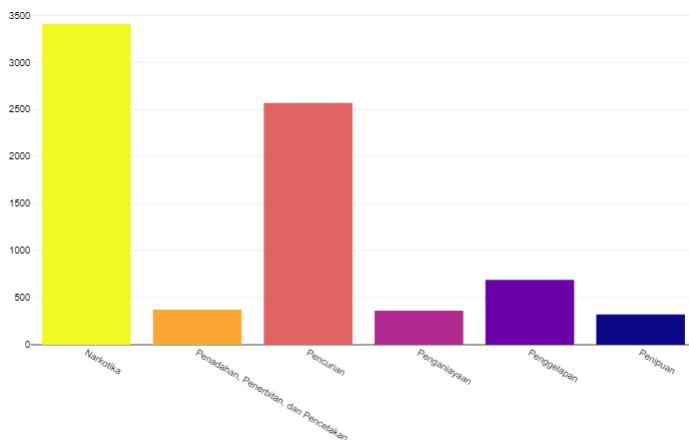
4.1.1.1 Karakteristik dan Gambaran Umum Perkara Pidana Biasa

Karakteristik lama proses perkara pidana biasa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Tahun	Total Perkara	Mean	Variance	Min	Max
2013	1108	62.4	1095.1	11	307
2014	1219	66.7	1132.2	6	497
2015	1156	57.7	727.5	15	394
2016	1282	57.9	563.9	14	184
2017	1156	62.5	753.1	12	308
2018	1343	68.8	10401.0	13	309
2019	1356	58.9	812.7	12	320
2020	632	51.6	653.2	1	126

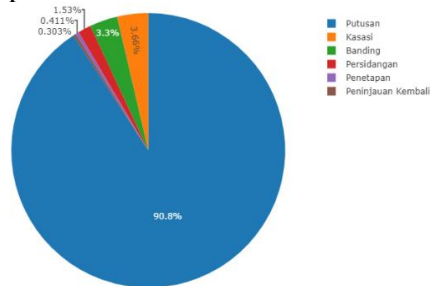
Perkara pidana biasa yang terdata pada SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru paling banyak terjadi pada tahun 2019 sebesar 1356 perkara dan paling sedikit terjadi pada tahun 2020 sebesar 632 perkara. Jumlah perkara pidana biasa dari tahun 2017 hingga tahun 2019 cenderung meningkat, artinya terjadi peningkatan tindak kriminalitas di masyarakat. Meningkatnya tindak kriminalitas di masyarakat dapat terjadi dikarenakan menurunnya faktor ekonomi dan kurangnya edukasi masyarakat. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata proses perkara paling lama terjadi pada tahun 2018 yaitu selama 69 hari dan rata-rata proses perkara paling sebentar terjadi pada tahun 2020 yaitu selama 52 hari atau dapat dikatakan bahwa rata-rata lama proses dari tahun 2019 hingga Juli 2020 cenderung menurun setelah terjadi peningkatan rata-rata lama proses perkara dari tahun 2016 hingga 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa performa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru semakin baik dalam menyelesaikan perkara pidana biasa. Selain itu, sistem hukum yang semakin baik merupakan salah satu faktor terjadinya peningkatan waktu proses perkara. Nilai variansi lama proses perkara pada tahun 2013 hingga 2020 sangat besar, artinya keheterogenan waktu proses perkara pidana biasa setiap tahunnya sangat tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam satu tahun dapat terjadi banyak klasifikasi perkara dan waktu proses pada tiap klasifikasi perkara pidana biasa berbeda. Beberapa solusi dalam meminimalisir keheterogenan waktu proses perkara ialah dengan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dan menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien. Waktu proses perkara paling sebentar terjadi pada tahun 2020 yaitu selama 1 hari dan waktu proses perkara paling lama terjadi pada tahun 2014 selama 497 hari. Visualiasasi jumlah perkara pidana biasa berdasarkan klasifikasi perkara ditampilkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Jumlah Perkara Pidana Biasa Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Data pidana biasa di SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan klasifikasi perkara terdiri atas 64 klasifikasi. Gambar 4.1 menunjukkan 6 klasifikasi perkara dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020 yang memiliki frekuensi tertinggi. Perkara dengan jumlah kasus terbesar ialah perkara narkotika yaitu sebesar 3408 kasus, diikuti dengan perkara pencurian sebesar 2567 kasus, dan perkara penggelapan sebesar 689 kasus. Hal tersebut dapat menjadi acuan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam mengantisipasi perkara pidana biasa yang sering terjadi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan membuat waktu proses perkara lebih efisien. Perkara pidana biasa dengan jumlah kasus terendah ialah perkara kejahatan jabatan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap ketertiban umum, meteorologi, klimatologi dan geofisika, pajak daerah dan retribusi daerah, pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran mengenai asal usul dan perkawinan, pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan, pencemaran nama baik, penerbangan, perbankan syariah negara, dan pertambangan mineral dan batubara. Masing-masing perkara tersebut hanya terjadi sekali di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020.

Selanjutnya dilakukan analisis perbandingan tahapan perkara pidana biasa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang ditampilkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Persentase Tahapan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Gambar 4.2 menunjukkan persentase tahapan perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 dimana berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebesar 90,8% perkara sudah dalam tahap putusan, 3,66% perkara dalam tahap kasasi, 3,3% perkara dalam tahap banding, 1,53% perkara dalam tahap persidangan, 0,411% perkara dalam tahap penetapan, dan 0,303% perkara dalam tahap peninjauan kembali.

4.1.1.2 Karakteristik dan Gambaran Umum Perkara Pidana Singkat

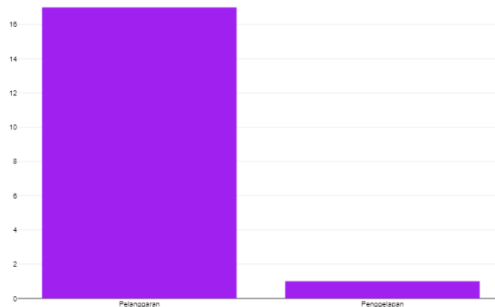
Perkara pidana singkat berdasarkan Pasal 203 Ayat (1) KUHAP merupakan perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Karakteristik lama proses perkara pidana singkat yang terdata di SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Tahun	Total Perkara	Mean	Variance	Min	Max
2014	7	7.7	8.9	1	9
2020	11	1.2	0.2	1	2

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah perkara pidana singkat terbesar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru

terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 11 perkara dimana pada tahun tersebut rata-rata waktu proses perkara lebih singkat yaitu 2 hari dibandingkan dengan tahun 2014 selama 8 hari, artinya performa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara pidana singkat semakin baik. Nilai variansi waktu proses perkara pidana singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru pada tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2014, artinya waktu proses perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru cenderung homogen di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara pidana singkat sudah sangat baik. Waktu proses paling singkat untuk perkara pidana singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ialah 1 hari dan waktu proses maksimum di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ialah 9 hari. Visualisasi jumlah perkara berdasarkan klasifikasi perkara ditampilkan pada Gambar 4.3.

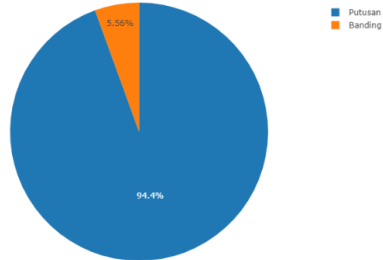


Gambar 4.3 Jumlah Perkara Pidana Singkat Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Data perkara pidana singkat di SIPP Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru berdasarkan klasifikasi perkara terdiri atas 2, yaitu; pelanggaran dan penggelapan. Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa total perkara pelanggaran yang terdata di SIPP Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ialah sebesar 17 perkara dan total perkara penggelapan sebesar 1 perkara. Hal tersebut menunjukkan perkara pidana singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru lebih didominasi oleh perkara pelanggaran. Hal tersebut

dapat menjadi acuan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam mengantisipasi perkara pidana singkat yang sering terjadi.

Selanjutnya dilakukan analisis perbandingan tahapan perkara pidana singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang ditampilkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Persentase Tahapan Perkara Pidana Singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Berdasarkan Gambar 4.4 ditunjukkan bahwa sebesar 94,4% perkara pidana singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 sudah dalam tahap putusan dan sisanya sebesar 5,56% perkara dalam tahap banding.

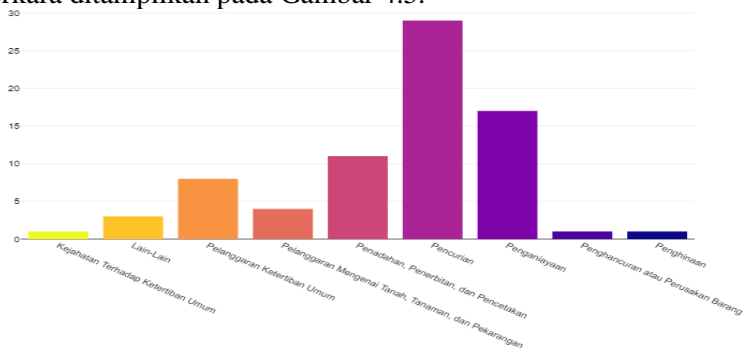
4.1.1.3 Karakteristik dan Gambaran Umum Perkara Pidana Cepat

Perkara pidana cepat menurut pasal 205 ayat (1) KUHAP diartikan sebagai perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 bulan penjara atau denda Rp7.500. Karakteristik lama proses perkara pidana cepat yang terdata di SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Cepat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Tahun	Total Perkara	Mean	Variance	Min	Max
2013	6	5.5	27.1	2	16
2015	9	3.0	2.5	1	6
2016	20	7.0	213.9	2	69
2017	17	3.4	1.4	1	6
2018	10	3.4	4.9	1	9
2019	5	1.0	0.0	1	1
2020	8	1.0	0.0	1	1

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa perkara pidana cepat paling banyak terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 20 perkara dan perkara paling sedikit terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 5 perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak kriminalitas di Pekanbaru pada tahun 2016 sangat tinggi, tetapi mulai tahun 2017 terjadi penurunan hingga tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Terjadi peningkatan jumlah perkara pidana cepat di tahun 2020 mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat pada tahun 2020. Salah satu faktornya ialah karena pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 membuat tingkat perekonomian masyarakat menurun dan memungkinkan meningkatnya tindak kriminalitas di masyarakat. Rata-rata lama proses perkara pidana cepat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru pada tahun 2019 dan 2020 konstan yaitu selama 1 hari dimana waktu proses terlama terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 69 hari, artinya performa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara pidana cepat semakin baik. Visualisasi jumlah perkara berdasarkan klasifikasi perkara ditampilkan pada Gambar 4.5.

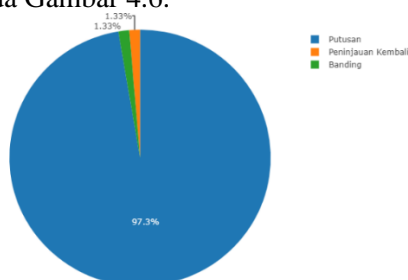


Gambar 4.5 Jumlah Perkara Pidana Cepat Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Perkara pidana cepat di SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terdata dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020 terdiri atas 9 klasifikasi perkara dimana perkara dengan frekuensi terbesar ialah perkara pencurian yaitu sebesar 29 perkara dan diikuti dengan

perkara penganiayaan sebesar 17 perkara. Informasi tersebut dapat menjadi acuan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan edukasi dan paparan untuk antisipasi masyarakat terkait perkara pidana cepat yang sering terjadi. Sedangkan perkara pidana cepat dengan frekuensi terendah ialah perkara kejahatan terhadap ketertiban umum, penghancuran atau perusakan barang, dan penghinaan yang hanya terjadi sekali di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.

Kemudian dilakukan analisis perbandingan tahapan perkara pidana cepat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang ditampilkan pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Persentase Tahapan Perkara Pidana Cepat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Gambar 4.6 menunjukkan persentase tahapan perkara pidana cepat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dimana sebesar 97,3% perkara pidana cepat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru sudah dalam tahap putusan, sedangkan perkara dalam tahap peninjauan kembali dan banding masing-masing sebesar 1,33%.

4.1.1.4 Karakteristik dan Gambaran Umum Perkara Pidana Pra Peradilan

Merujuk Pasal 1 butir 10 *jo* Pasal 77 KUHAP, pra peradilan merupakan wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri dengan tujuan sebagai kontrol atau pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau

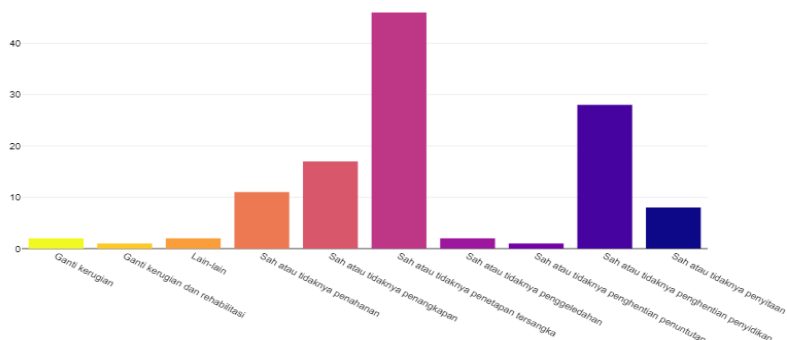
tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkara tidak diajukan ke pengadilan, dan sah atau tidaknya penyitaan barang bukti. Karakteristik lama proses perkara pidana pra peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ditampilkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Tahun	Total Perkara	Mean	Variance	Min	Max
2016	24	18.4	47.0	2	37
2017	27	20.3	48.1	10	36
2018	28	20.1	49.8	5	36
2019	22	22.3	70.4	7	37
2020	17	27.2	22.9	20	40

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa perkara pra peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru paling banyak terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 28 kasus. Jumlah perkara pidana pra peradilan cenderung menurun dari tahun 2019 hingga 2020. Rata-rata waktu proses perkara paling lama terjadi pada tahun 2020 yaitu selama 28 hari dan rata-rata waktu proses perkara paling singkat terjadi pada tahun 2016 yaitu selama 19 hari. Rata-rata waktu proses perkara pidana pra peradilan dari tahun 2019 hingga 2020 cenderung meningkat, artinya performa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru cenderung menurun dalam menyelesaikan perkara pidana pra peradilan. Salah satu solusi dalam meningkatkan performa pelayanan ialah melakukan peningkatan sistem hukum untuk pidana pra peradilan dan membuat sistem yang efisien untuk meningkatkan kinerja pegawai. Variansi lama proses perkara pidana pra peradilan dari tahun 2016 hingga 2020 cukup besar, sehingga dapat disimpulkan waktu proses perkara pra peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru cenderung heterogen. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam satu tahun dapat terjadi banyak klasifikasi perkara dan waktu proses pada tiap klasifikasi perkara pidana pra peradilan berbeda. Beberapa

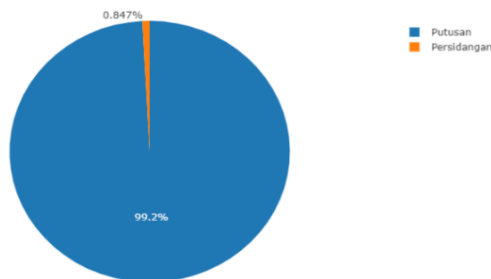
solusi dalam meminimalisir keheterogenan waktu proses perkara ialah dengan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dan menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien. Visualisasi jumlah perkara pidana pra peradilan berdasarkan klasifikasi perkara ditampilkan pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Jumlah Perkara Pidana Pra Peradilan Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Berdasarkan Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa perkara pidana pra peradilan yang terdata di SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020 terdiri atas 10 klasifikasi perkara. Frekuensi perkara pidana pra peradilan terbanyak ialah perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka yaitu sebesar 46 perkara, selanjutnya diikuti dengan perkara sah atau tidaknya penghentian penyidikan yaitu sebesar 28 perkara. Sedangkan perkara pidana pra peradilan dengan frekuensi terkecil ialah perkara ganti kerugian dan perkara sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang hanya terjadi sekali di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Hal tersebut dapat menjadi acuan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam mengantisipasi perkara pidana pra peradilan yang sering terjadi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan membuat waktu proses perkara lebih efisien.

Kemudian dilakukan analisis perbandingan tahapan perkara pidana pra peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ditampilkan pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Persentase Tahapan Perkara Pidana Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa persentase tahapan perkara pidana pra peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 sebesar 99,2% perkara pidana pra peradilan sudah dalam tahap putusan dan sisanya sebesar 0,847% perkara dalam tahap persidangan.

4.1.1.5 Karakteristik dan Gambaran Perkara Lalu Lintas

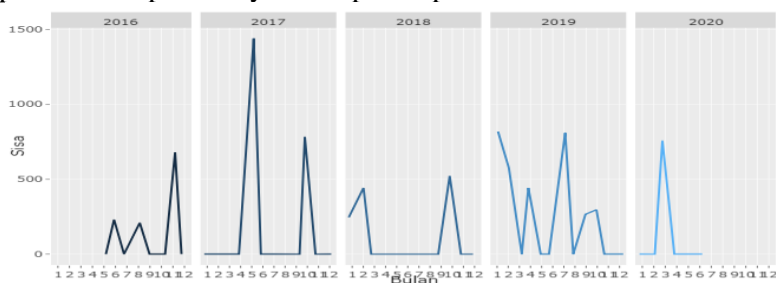
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat, dan setelah proses persidangan. Pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur di Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Karakteristik perkara pidana pra peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ditampilkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Karakteristik Perkara Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Tahun	Jumlah Perkara	Minimum	Maximum
2016	13638	682	4479
2017	30880	721	4887
2018	23747	802	3839
2019	37881	938	7358
2020	22520	62	7609

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang terdata dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 dengan frekuensi terbanyak terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 37.881 perkara, sedangkan frekuensi terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 13.638 perkara. Jumlah perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 cenderung naik dan turun setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat Pekanbaru yang kurang peduli akan peraturan lalu lintas, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar menaati peraturan lalu lintas.

Setiap bulannya dalam proses keluar masuk perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru memungkinkan adanya sisa perkara yang belum diselesaikan. Secara visual sisa perkara setiap bulannya ditampilkan pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Sisa Perkara Lalu Lintas Setiap Bulan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari Tahun 2016 Hingga 1 Juli 2020.

Berdasarkan Gambar 4.9 dapat dilihat bahwa sisa perkara lalu lintas terbanyak terjadi pada bulan Mei tahun 2017 yaitu sebesar 1.440 perkara, diikuti bulan Januari tahun 2019 sebesar 819 perkara. Gambar 4.9 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sering terjadi perkara lalu lintas yang bersisa yaitu sebanyak 6 kali pada bulan Januari, Februari, April, Juli, September, dan Oktober. Informasi tersebut dapat menjadi evaluasi kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru untuk meningkatkan sistem pelayanan perkara lalu lintas, sehingga dapat membuat waktu proses perkara lebih efisien.

4.1.2 Pidana Khusus

Hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu, seperti anggota angkatan bersenjata atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu diluar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Perkara pidana khusus yang terjadi dan terdata pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pekanbaru terbagi atas dua kelompok, yaitu; pidana anak dan tindak pidana korupsi. Jumlah perkara pidana khusus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020 ialah sebesar 806 perkara. Adapun karakteristik dan gambaran umum pada tiap kelompok adalah sebagai berikut.

4.1.2.1 Karakteristik dan Gambaran Perkara Pidana Anak

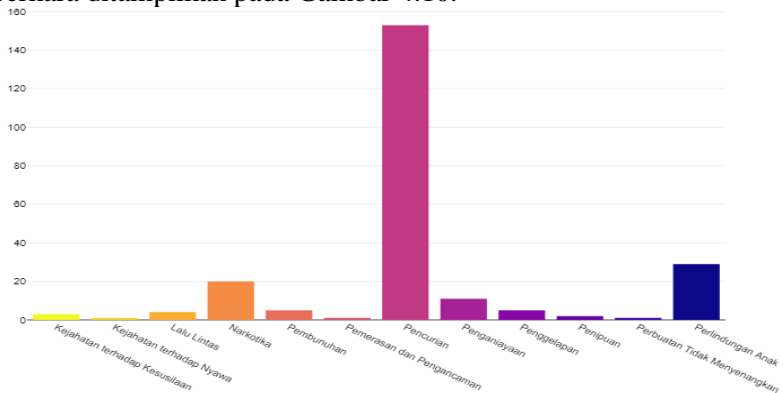
Pidana anak (*kinderstraf*) adalah pidana bagi anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Karakteristik lama proses pidana anak ditampilkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Karakteristik Lama Proses Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Tahun	Total Perkara	Mean	Variance	Min	Max
2014	1	84.0	*	84	84
2015	16	129	195055	5	1785
2016	22	19.1	77.5	11	48
2017	50	18.9	94.6	6	60
2018	36	15.7	56.4	5	50
2019	73	15.0	59.7	4	49
2020	37	14.6	86.6	3	61

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2014 hingga 2017 cenderung mengalami kenaikan dan kemudian jumlah perkara pidana anak turun dan naik kembali pada tahun 2019 hingga akhirnya turun kembali pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak dibawah umur di Pekanbaru yang melakukan tindak kriminal. Kurangnya pengetahuan dan faktor lingkungan terutama keluarga merupakan faktor utama masih banyak anak-anak dibawah umur yang

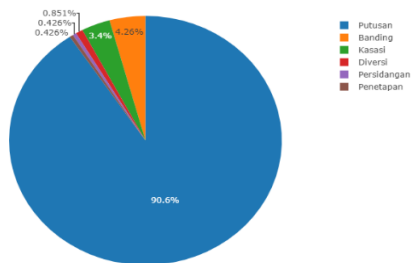
melakukan tindak kriminal. Pemerintah perlu melakukan antisipasi dengan meningkatkan moral dan pengetahuan anak-anak dibawah umur, sehingga dapat meminimalisir tindak kriminalitas pada anak-anak dibawah umur. Rata-rata waktu proses perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru paling lama terjadi pada tahun 2015 yaitu selama 129 hari, sedangkan rata-rata waktu proses perkara paling sebentar terjadi pada tahun 2019 dan 2020 yaitu selama 15 hari. Rata-rata waktu proses perkara pidana anak dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 mengalami penurunan. Artinya pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara pidana anak semakin baik. Variansi lama proses perkara pidana anak dari tahun 2014 hingga 2020 cukup besar, sehingga dapat disimpulkan waktu proses perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru cenderung heterogen. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam satu tahun dapat terjadi banyak klasifikasi perkara dan waktu proses pada tiap klasifikasi perkara pidana anak berbeda. Beberapa solusi dalam meminimalisir keheterogenan waktu proses perkara ialah dengan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dan menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien. Visualisasi jumlah perkara pidana anak berdasarkan klasifikasi perkara ditampilkan pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Jumlah Perkara Pidana Anak Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020 berdasarkan klasifikasi perkara terdiri atas 12 klasifikasi perkara, dimana perkara yang sering terjadi ialah perkara pencurian yaitu sebanyak 153 perkara, diikuti dengan perkara perlindungan anak sebanyak 29 perkara, dan perkara narkoba sebanyak 20 perkara. Sedangkan perkara yang jarang terjadi ialah kejahatan terhadap nyawa, pemerasan dan pengancaman, dan perbuatan tidak menyenangkan yang hanya terjadi sekali di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Informasi tersebut dapat menjadi acuan kepada pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman mengenai perkara yang sering terjadi pada anak-anak dibawah umur.

Selanjutnya dilakukan perbandingan tahapan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 yang ditampilkan pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 Persentase Tahapan Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Berdasarkan Gambar 4.11 dapat dilihat bahwa perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 sebesar 90,6% perkara pidana anak sudah dalam tahap putusan, 4,26% perkara dalam tahap banding, 3,4% perkara dalam tahap kasasi, 0,851% perkara dalam tahap diversi, 0,426% perkara dalam tahap persidangan, dan 0,426% perkara dalam tahap penetapan.

4.1.2.2 Karakteristik dan Gambaran Perkara Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan

Pasal 3 merupakan setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karakteristik lama proses perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ditampilkan pada Tabel 4.7.

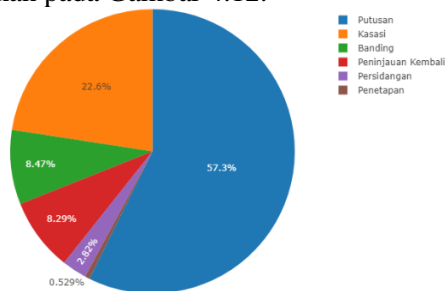
Tabel 4.7 Karakteristik Lama Proses Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Tahun	Total Perkara	Mean	Variance	Min	Max
2013	67	130.6	1358.4	75	242
2014	66	139.3	1061.2	56	268
2015	88	115.2	701.1	34	155
2016	88	115.5	629.6	63	162
2017	99	118.2	1543.3	32	236
2018	64	118.1	685.0	49	152
2019	65	114.1	533.5	62	142
2020	30	87.7	1516.7	3	141

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru terbanyak terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 99 kasus, sedangkan perkara yang paling sedikit terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 30 kasus. Penurunan jumlah perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2020 mengindikasikan terjadinya peningkatan kejujuran masyarakat Pekanbaru untuk tidak melakukan korupsi. Walaupun demikian, pemerintah tetap harus menanamkan sifat anti korupsi pada masyarakat sehingga kemudian perkara tindak pidana korupsi di Pekanbaru tidak terjadi. Rata-rata waktu proses perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2018 hingga 1 Juli 2020 cenderung mengalami penurunan dimana waktu proses paling singkat terjadi pada tahun 2020 yaitu selama 88 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelayanan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi. Kemudian nilai variansi waktu proses perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020 sangat besar, artinya waktu proses perkara di Pengadilan

Negeri Kelas 1A Pekanbaru heterogen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru setiap orangnya berbeda. Beberapa faktor yang mempengaruhi ialah dikarenakan proses pembuktian terdakwa dan banyaknya saksi dalam perkara. Beberapa solusi dalam meminimalisir keheterogenan waktu proses perkara ialah dengan meningkatkan sistem hukum terkait tindak pidana korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Waktu proses perkara tindak pidana korupsi yang paling singkat terjadi pada tahun 2020 yaitu selama 3 hari dan waktu proses perkara tindak pidana korupsi yang paling lama terjadi pada tahun 2014 yaitu selama 268 hari.

Kemudian dilakukan analisis perbandingan tahapan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru yang ditunjukkan pada Gambar 4.12.



Gambar 4.12 Persentase Tahapan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Gambar 4.12 menunjukkan bahwa perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020 sebesar 57,3% perkara sudah dalam tahap putusan, 22,6% perkara dalam tahap kasasi, 8,47% perkara dalam tahap banding, 8,29% perkara dalam tahap peninjauan kembali, 2,82% perkara dalam tahap persidangan, dan 0,529% perkara dalam tahap penetapan.

4.1.3 Perdata Umum

Perkara perdata umum adalah perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu

badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan. Perkara perdata umum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pekanbaru terbagi atas empat kelompok, yaitu; perdata gugatan, perdata gugatan sederhana, perdata gugatan bantahan, dan perdata permohonan. Jumlah perkara perdata umum di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ialah sebesar 5881 perkara. Adapun karakteristik dan gambaran umum pada tiap kelompok adalah sebagai berikut.

4.1.3.1 Karakteristik dan Gambaran Perkara Perdata Gugatan

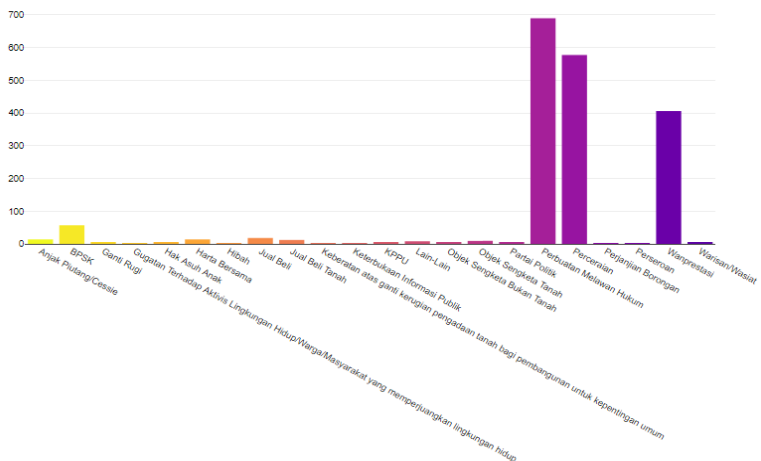
Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Bentuk gugatan ada 2 macam, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) jo Pasal 142 *Rectstreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk gugatan tertulis dan Pasal 120 HIR untuk gugatan lisan. Karakteristik lama proses perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Karakteristik Lama Proses Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Tahun	Total Perkara	Mean	Variance	Min	Max
2013	146	158.8	7729.4	16	379
2014	128	99.7	3304.4	3	312
2015	162	117.8	5526.0	13	407
2016	317	124.1	5455.2	7	357
2017	291	127.5	5701.7	2	367
2018	307	136.7	6650.2	4	423
2019	327	102.4	4247.4	1	317
2020	154	72.3	1727.4	1	177

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat ditunjukkan bahwa perkara perdata umum paling banyak terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 327 kasus. Jumlah perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2018 hingga 2019 cenderung

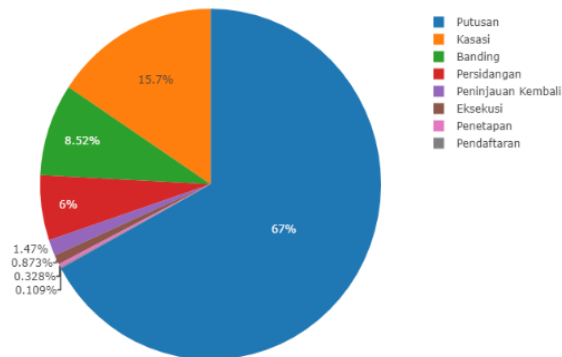
meningkat. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat Pekanbaru mengenai hukum. Rata-rata waktu proses perkara perdata gugatan dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan, tetapi dari tahun 2019 hingga 1 Juli 2020 cenderung menurun. Artinya pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara perdata gugatan semakin baik. Nilai variansi waktu proses perkara dari tahun 2013 hingga 2020 sangat besar, artinya waktu proses perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru heterogen. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam satu tahun dapat terjadi banyak klasifikasi perkara dan waktu proses pada tiap klasifikasi perkara perdata gugatan berbeda. Beberapa solusi dalam meminimalisir keheterogenan waktu proses perkara ialah dengan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dan menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien. Waktu proses perkara perdata gugatan paling singkat terjadi pada tahun 2019 dan 2020 yaitu selama 1 hari dan waktu proses paling lama terjadi pada tahun 2018 yaitu selama 423 hari. Visualisasi jumlah perkara perdata gugatan berdasarkan klasifikasi perkara ditampilkan pada Gambar 4.13.



Gambar 4.13 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Gambar 4.13 menunjukkan bahwa perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020 berdasarkan klasifikasi perkara terdiri atas 22 klasifikasi perkara, dimana perkara yang sering terjadi ialah perkara perbuatan melawan hukum sebanyak 689 perkara, perkara perceraian sebesar 577 perkara, dan perkara wanprestasi sebesar 406 perkara. Sedangkan perkara yang jarang terjadi ialah perkara gugatan terhadap aktivis lingkungan hidup/warga/masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup, hibah, keberatan atas ganti kerugian pangadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, keterbukaan informasi publik, dan perseroan yang hanya terjadi sekali di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Informasi tersebut dapat menjadi acuan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam mengantisipasi perkara perdata gugatan berdasarkan klasifikasi perkara yang sering terjadi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan membuat waktu proses perkara lebih efisien.

Selanjutnya dilakukan perbandingan tahapan perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 yang ditampilkan pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14 Persentase Tahapan Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Berdasarkan Gambar 4.14 dapat dilihat bahwa persentase tahapan perkara perdata gugatan dari tahun 2013 hingga 1 Juli 2020

sebesar 67% perkara perdata gugatan sudah dalam tahap putusan, 15,7% perkara dalam tahap kasasi, 8,52% perkara dalam tahap banding, 6% perkara dalam tahap persidangan, 1,47% perkara dalam tahap peninjauan kembali, 0,873% perkara dalam tahap eksekusi, 0,328% perkara dalam tahap penetapan, dan 0,109% perkara dalam tahap pendaftaran.

4.1.3.2 Karakteristik dan Gambaran Perkara Perdata Gugatan Sederhana

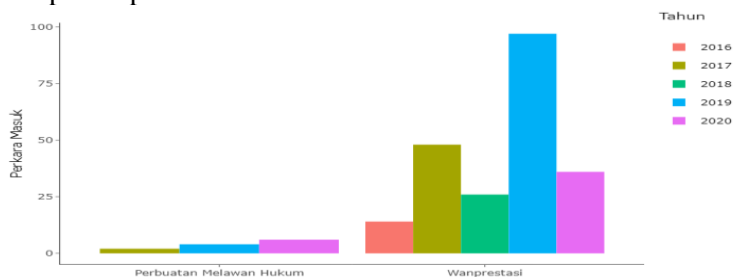
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa gugatan sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Di samping itu, gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Karakteristik lama proses perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ditunjukkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Karakteristik Lama Proses Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Tahun	Total Perkara	Mean	Variance	Min	Max
2016	14	42.4	264.1	6	72
2017	50	39.1	392.7	10	120
2018	26	37.6	197.1	14	64
2019	101	36.9	458.3	3	113
2020	42	33.9	261.7	2	66

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa perkara perdata gugatan sederhana paling banyak terjadi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru pada tahun 2019 yaitu sebanyak 101 perkara, sedangkan perkara gugatan sederhana paling sedikit terjadi di tahun 2016 yaitu 14 perkara. Semakin tingginya jumlah perkara perdata gugatan sederhana mengindikasikan meningkatnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Pekanbaru mengenai hukum perdata gugatan sederhana. Rata-rata waktu proses perkara gugatan

sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 cenderung menurun, sehingga dapat disimpulkan bahwa performa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara perdata gugatan sederhana semakin baik. Waktu proses perkara perdata gugatan sederhana paling singkat terjadi pada tahun 2020 yaitu selama 2 hari, sedangkan waktu proses perkara perdata gugatan sederhana paling lama terjadi pada tahun 2017 yaitu selama 120 hari. Nilai variansi waktu proses perkara perdata gugatan sederhana dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 cukup besar, artinya waktu proses perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru cenderung heterogen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru setiap kasusnya berbeda. Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah dikarenakan domisili para pihak berperkara yang berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, sehingga dilakukan panggilan secara delegasi. Salah satu solusi dalam meminimalisir keheterogenan waktu proses perkara ialah dengan menerapkan E-Court dan E-Litigasi, sehingga semua proses pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara bisa lebih efisien. Visualisasi jumlah perkara perdata gugatan sederhana berdasarkan klasifikasi perkara ditampilkan pada Gambar 4.15.

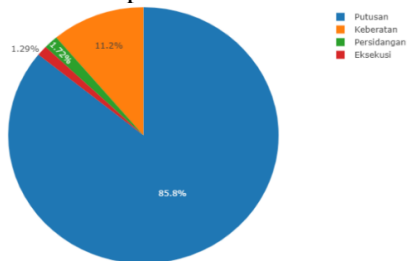


Gambar 4.15 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Berdasarkan Gambar 4.15 dapat ditunjukkan bahwa perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A

Pekanbaru dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 berdasarkan klasifikasi perkara terbagi atas 2, yaitu perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Jumlah perkara perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru setiap tahunnya cenderung meningkat, sedangkan perkara wanprestasi cenderung naik dan turun setiap tahunnya dimana perkara terbanyak terjadi di tahun 2019 yaitu sebanyak 97 perkara. Informasi tersebut dapat menjadi acuan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam mengantisipasi perkara perdata gugatan sederhana berdasarkan klasifikasi perkara yang sering terjadi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan membuat waktu proses perkara lebih efisien.

Selanjutnya dilakukan perbandingan tahapan perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 pada Gambar 4.16.



Gambar 4.16 Persentase Tahapan Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Gambar 4.16 menunjukkan bahwa persentase tahapan perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 sebesar 85,8% perkara sudah dalam tahap putusan, 11,2% perkara dalam tahap keberatan, 1,72% perkara dalam tahap persidangan, dan 1,29% perkara dalam tahap eksekusi.

4.1.3.3 Karakteristik dan Gambaran Perkara Perdata Gugatan Bantahan

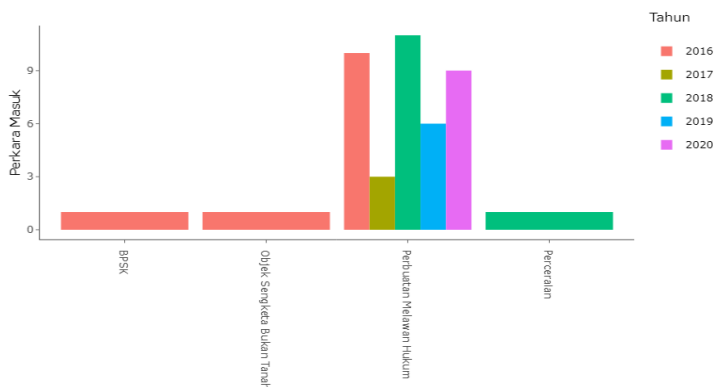
Bantahan merupakan upaya tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Karakteristik lama proses perkara perdata gugatan bantahan ditampilkan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Karakteristik Lama Proses Perkara Perdata Gugatan Bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Tahun	Total Perkara	Mean	Variance	Min	Max
2016	12	144.7	10852.1	8.0	329.0
2017	3	196.7	1576.3	151.0	223.0
2018	12	140.2	9674.3	13.0	296.0
2019	6	151.3	5653.9	27.0	243.0
2020	9	51.67	178.75	24.00	64.00

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat ditunjukkan bahwa perkara perdata gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan frekuensi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan 2018 yaitu sebanyak 12 perkara. Terjadinya peningkatan jumlah perkara perdata gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru pada tahun 2020 mengindikasikan meningkatnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Pekanbaru mengenai hukum perdata gugatan bantahan. Rata-rata waktu proses perkara perdata gugatan bantahan dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 cenderung naik dan turun setiap tahunnya yang mengindikasikan bahwa performa pelayanan dalam menyelesaikan perkara perdata gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru naik dan turun setiap tahunnya. Waktu proses perkara perdata gugatan bantahan paling singkat dan paling lama terjadi pada tahun 2016. Nilai variansi waktu proses perkara perdata gugatan bantahan dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 sangat besar, artinya waktu proses perkara perdata gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru cenderung heterogen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan perkara perdata gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru setiap kasusnya berbeda. Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah dikarenakan domisili para pihak berperkara yang berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, sehingga dilakukan panggilan secara delegasi. Salah satu solusi dalam meminimalisir keheterogenan waktu proses perkara ialah dengan menerapkan E-Court dan E-Litigasi, sehingga semua proses pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara bisa lebih efisien. Visualisasi jumlah perkara perdata gugatan

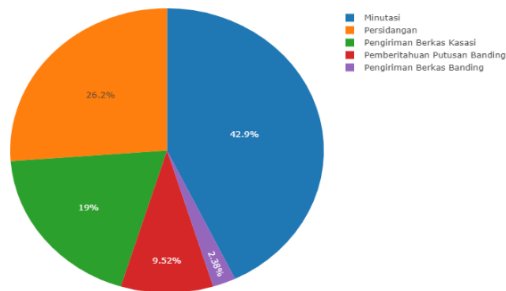
bantahan berdasarkan klasifikasi perkara ditampilkan pada Gambar 4.17.



Gambar 4.17 Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bantahan Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Gambar 4.17 menunjukkan bahwa perkara perdata gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 berdasarkan klasifikasi perkara terdiri dari 4 perkara, yaitu perkara BPSK, objek sengketa bukan tanah, perbuatan melawan hukum, dan perceraian. Perkara BPSK, objek sengketa bukan tanah, dan perceraian hanya terjadi sekali di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Sedangkan perkara perbuatan melawan hukum dari tahun 2016 hingga 1 Juli 2020 selalu terjadi setiap tahunnya, dimana frekuensi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 11 perkara. Informasi tersebut dapat menjadi acuan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam mengantisipasi perkara perdata gugatan bantahan berdasarkan klasifikasi perkara yang sering terjadi, sehingga Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat meningkatkan pelayanan dan membuat waktu proses perkara lebih efisien.

Selanjutnya dilakukan perbandingan status perkara perdata gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 pada Gambar 4.18.



Gambar 4.18 Persentase Status Perkara Perdata Gugatan Bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Berdasarkan Gambar 4.18 dapat dilihat bahwa status perkara perdata gugatan bantahan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 sebesar 42,9% perkara sudah dalam status minutasi, 26,2% perkara dalam status persidangan, 19% perkara dalam status pengiriman berkas kasasi, 9,52% perkara dalam status pemberitahuan putusan banding, dan 2,38% perkara dalam status pengiriman berkas banding.

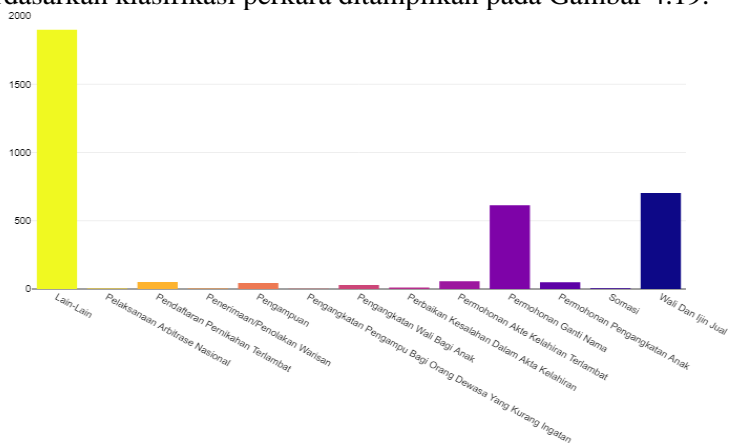
4.1.3.4 Karakteristik dan Gambaran Perkara Perdata Permohonan

Permohonan merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Karakteristik lama proses perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ditampilkan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Karakteristik Lama Proses Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

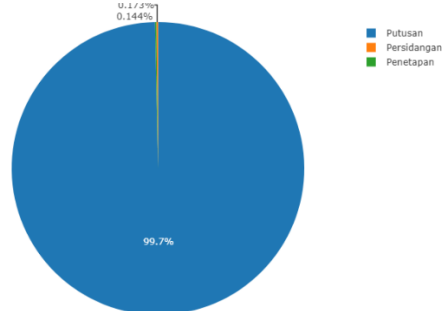
Tahun	Total Perkara	Mean	Variance	Min	Max
2013	1843	17.2	282.2	1	309
2014	203	12.8	126.6	2	80
2015	181	19.3	1178.8	3	363
2016	204	20.3	621.8	4	288
2017	297	15.2	117.0	2	93
2018	308	14.1	127.9	1	159
2019	300	15.5	128.1	4	135
2020	134	17.1	62.2	3	52

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa perkara perdata permohonan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan frekuensi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1843 perkara, sedangkan frekuensi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 134 perkara. Semakin tingginya jumlah perkara perdata permohonan mengindikasikan meningkatnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Pekanbaru mengenai hukum perdata permohonan. Rata-rata waktu proses perkara dari tahun 2017 hingga 2018 cenderung turun, sedangkan rata-rata waktu proses pada tahun 2019 hingga 1 Juli 2020 cenderung meningkat. Artinya performa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara perdata permohonan cenderung menurun. Tingginya variansi waktu proses perkara perdata permohonan dapat disebabkan karena domisili para pihak berperkara yang berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, sehingga perlu dilakukan panggilan secara delegasi. Salah satu solusi dalam meminimalisir keheterogenan atau tingginya variansi waktu proses perkara ialah dengan menerapkan E-Court dan E-Litigasi, sehingga semua proses pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara bisa lebih efisien. Visualisasi jumlah perkara perdata permohonan berdasarkan klasifikasi perkara ditampilkan pada Gambar 4.19.



Gambar 4.19 Jumlah Perkara Perdata Permohonan Berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Berdasarkan Gambar 4.19 dapat dilihat bahwa perkara perdata permohonan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 berdasarkan klasifikasi perkara terdiri atas 13 perkara, dimana perkara dengan frekuensi tertinggi terjadi ialah perkara lain-lain yaitu sebanyak 1900 perkara. Selanjutnya perkara wali dan ijin jual sebanyak 704 perkara, serta perkara permohonan ganti nama sebanyak 613 perkara. Informasi tersebut dapat menjadi acuan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam mengantisipasi perkara perdata permohonan berdasarkan klasifikasi perkara yang sering terjadi, sehingga Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat meningkatkan pelayanan dan membuat waktu proses perkara lebih efisien. Kemudian dilakukan perbandingan tahapan perkara perdata permohonan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 pada Gambar 4.20.



Gambar 4.20 Persentase Tahapan Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Gambar 4.20 menunjukkan perkara perdata permohonan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 sebesar 99,7% perkara sudah dalam tahap putusan, sedangkan 0,173% perkara dalam tahap persidangan, dan 0,144% perkara dalam tahap penetapan.

4.1.4 Perdata Khusus

Perdata khusus adalah perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antar badan usaha atau badan hukum dengan kepentingan perseorangan yang diatur secara khusus (*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*). Perkara perdata khusus yang

terjadi dan terdata di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya terdiri atas Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Jumlah perkara perdata khusus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ialah sebesar 665 perkara.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Karakteristik lama proses perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 ditunjukkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Karakteristik Lama Proses Perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Tahun	Total Perkara	Mean	Variance	Min	Max
2013	44	100.2	2302.6	21	238
2014	65	114.6	1888.4	25	212
2015	68	94.4	1141.4	24	202
2016	103	87.2	707.5	16	173
2017	102	89.7	709.5	21	166
2018	105	96.7	1818.1	3	322
2019	124	96.1	1447.2	23	262
2020	54	81.9	1635.0	13	177

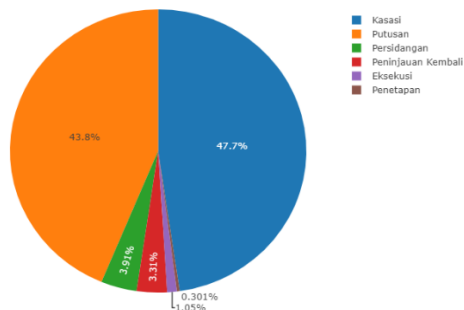
Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru cenderung mengalami peningkatan frekuensi perkara setiap tahunnya dari tahun 2013 hingga 2019, tetapi pada tahun 2020 (terdata hingga 1 Juli 2020) terjadi penurunan jumlah perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Semakin tingginya jumlah perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengindikasikan meningkatnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Pekanbaru mengenai hukum Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Rata-rata waktu proses perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dari tahun 2016 hingga tahun 2018 cenderung meningkat, tetapi pada tahun 2019 hingga 2020 waktu proses perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) cenderung menurun. Sehingga dapat

Kategori Perselisihan	Jumlah Pengaduan
Lain - Lain	~5
Pemberhentian Karena Tanpa Adanya SKB (Surat Keputusan Bersama)	~10
Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Adanya SKB	~10
Perselisihan Hubungan Antar Pekerja	~10
Perselisihan Hak Pekerja Dalam 1 (satu) Perusahan	~20
Perselisihan Hubungan Kerja Karena Upah Tidak Dibayar	~10
Perselisihan Hubungan Kerja Karena Pekerja Sudah Dipekerjakan Tidak Dipekerjakan	~10
Perselisihan Hubungan Kerja Karena Pekerja Keahlian Pekerja	~100
Perselisihan Hubungan Kerja Karena Mutasi Pekerja	~480
Perselisihan Hubungan Kerja Karena Mutasi Pekerja	~10
Perselisihan Hubungan Kerja Karena Mutasi Pekerja	~10
Perselisihan Hubungan Kerja Karena Mutasi Pekerja	~10
Perselisihan Hubungan Kerja Karena Mutasi Pekerja	~10
Perselisihan Hubungan Kerja Karena Mutasi Pekerja	~10

39

Gambar 4.21 menunjukkan bahwa perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru berdasarkan klasifikasi perkara terdiri atas 13 klasifikasi, dimana klasifikasi perkara dengan frekuensi tertinggi ialah perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak yaitu sebanyak 487 perkara dan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja massal sebanyak 107 perkara. Klasifikasi perkara yang jarang terjadi atau hanya terjadi sekali di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru ialah perkara pemberhentian karena tanpa adanya SKB (Surat Kesepakatan Bersama), perkara perselisihan antar pekerja dalam satu perusahaan, dan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan tindak pidana. Informasi tersebut dapat menjadi acuan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam mengantisipasi perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berdasarkan klasifikasi perkara yang sering terjadi, sehingga Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat meningkatkan pelayanan dan membuat waktu proses perkara lebih efisien.

Selanjutnya dilakukan perbandingan tahapan perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020 pada Gambar 4.22.



Gambar 4.22 Persentase Tahapan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Hingga 1 Juli 2020.

Berdasarkan Gambar 4.22 dapat dilihat bahwa 47,7% perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam tahap kasasi, 43,8% perkara sudah dalam tahap putusan, 3,91% perkara dalam tahap

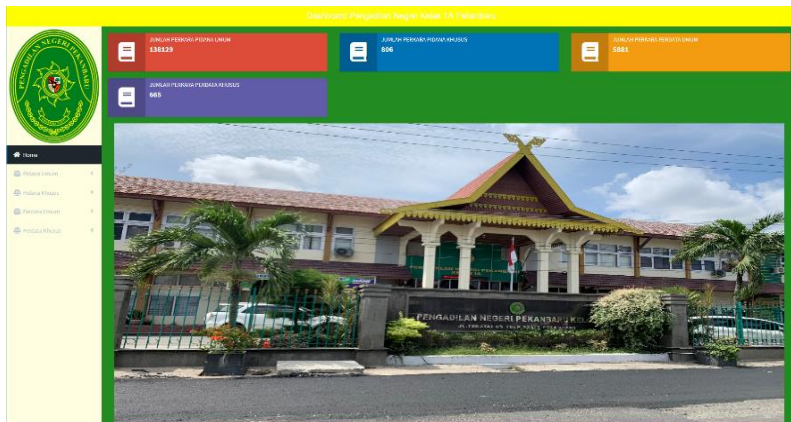
persidangan, 3,31% perkara dalam tahap peninjauan kembali, 1,05% perkara dalam tahap eksekusi, dan 0,301% perkara dalam tahap penetapan.

4.2 *Dashboard* Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru

Tugas utama dalam pelaksanaan kerja praktik di Pengadilan Negeri Kelas 1A pekanbaru ialah pembuatan *dashboard* yang dapat di *publish* dalam bentuk *web*. Pembuatan *dashboard* ini dengan menggunakan *software Shiny R*. *Dashboard* Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru terdiri dari 5 menu yang dapat dipilih. Penjelasan pada masing-masing menu *dashboard* ialah sebagai berikut.

4.2.1 Menu *Home*

Menu *home* merupakan menu utama yang pertama kali ditampilkan pada saat membuka *dashboard*. Berikut tampilan *home* (menu utama) pada *dashboard* Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.



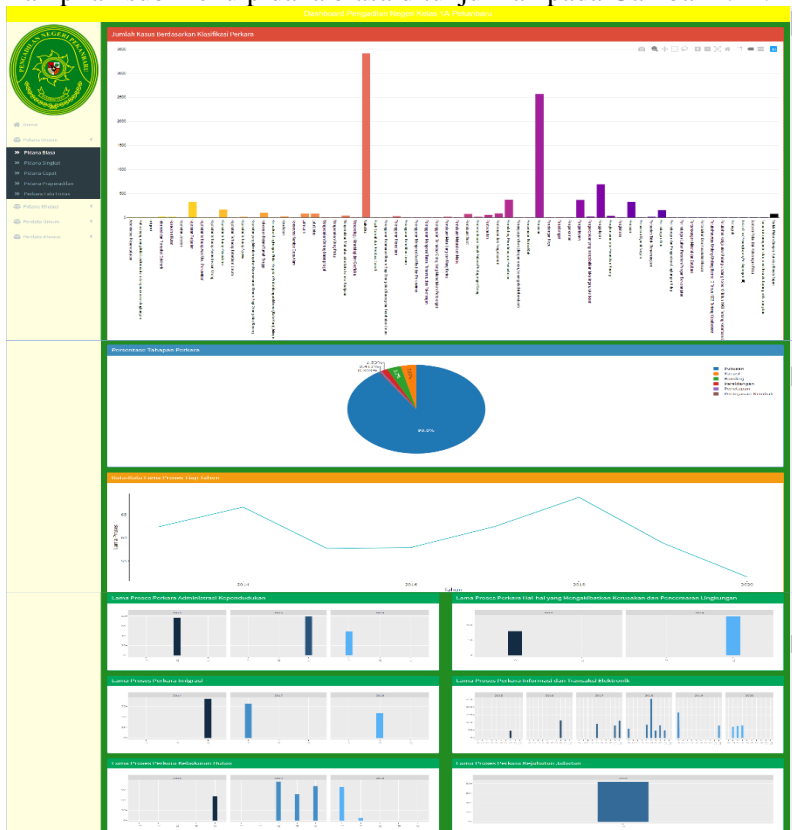
Gambar 4.23 Tampilan *Home*.

Berdasarkan Gambar 4.23 dapat dilihat pada tampilan menu *home* terdapat 4 *info box* yang menampilkan jumlah perkara pada tiap perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru per 1 Juli 2020. *Info box* yang berwarna merah merupakan jumlah perkara pidana umum, *info box* yang berwarna biru merupakan jumlah perkara pidana khusus, *info box* yang berwarna kuning merupakan

jumlah perkara perdata umum, dan *info box* yang berwarna ungu merupakan jumlah perkara perdata khusus.

4.2.2 Menu Pidana Umum

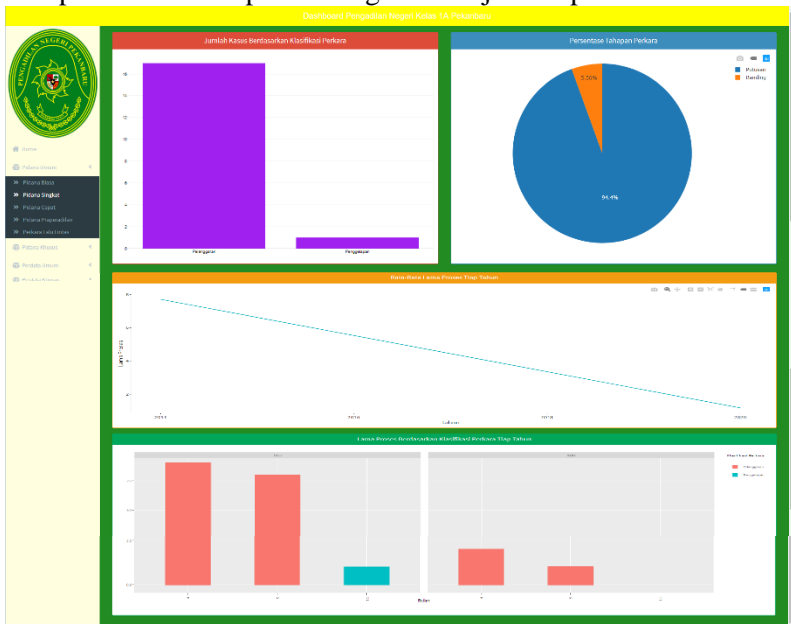
Terdapat 5 sub menu pada pidana umum diantaranya ialah pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana pra peradilan, dan perkara lalu lintas. Sub menu pidana biasa menampilkan jumlah perkara pidana biasa berdasarkan klasifikasi perkara, persentase tahapan perkara, rata-rata lama proses perkara tiap tahun, dan lama proses pada masing-masing klasifikasi perkara tiap tahunnya. Tampilan sub menu pidana biasa ditunjukkan pada Gambar 4.24.



Gambar 4.24 Tampilan Sub Menu Pidana Biasa.

Berdasarkan Gambar 4.24 dapat ditunjukkan jumlah perkara pidana biasa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru berdasarkan klasifikasi perkara untuk mengetahui perbandingan frekuensi pada masing-masing klasifikasi perkara. Gambar 4.24 juga menunjukkan persentase tahapan perkara per 1 Juli 2020 dan rata-rata lama proses perkara pidana biasa tiap tahunnya untuk menunjukkan performa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru juga dapat mengevaluasi waktu proses perkara pada masing-masing klasifikasi perkara untuk melihat performa pelayanannya setiap tahunnya yang ditampilkan pada Gambar 4.24.

Kemudian pada sub menu pidana singkat menampilkan jumlah perkara pidana biasa berdasarkan klasifikasi perkara, persentase tahapan perkara, rata-rata lama proses perkara tiap tahun, dan lama proses berdasarkan klasifikasi perkara tiap tahun. Tampilan sub menu pidana singkat ditunjukkan pada Gambar 4.25.



Gambar 4.25 Tampilan Sub Menu Pidana Singkat.

Berdasarkan Gambar 4.25 dapat dilihat jumlah kasus berdasarkan klasifikasi perkara untuk mengetahui perbandingan tingkat frekuensi pada masing-masing klasifikasi perkara, disebelah kanannya dapat melihat persentase tahapan perkara pidana singkat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, dan dibawahnya dapat melihat rata-rata lama proses perkara tiap tahun untuk melihat tingkat performa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara pidana singkat setiap tahunnya. Gambar 4.25 juga menunjukkan tingkat lama proses berdasarkan klasifikasi perkara tiap tahunnya untuk mengevaluasi dan membandingkan performa pada masing-masing klasifikasi perkara setiap tahunnya.

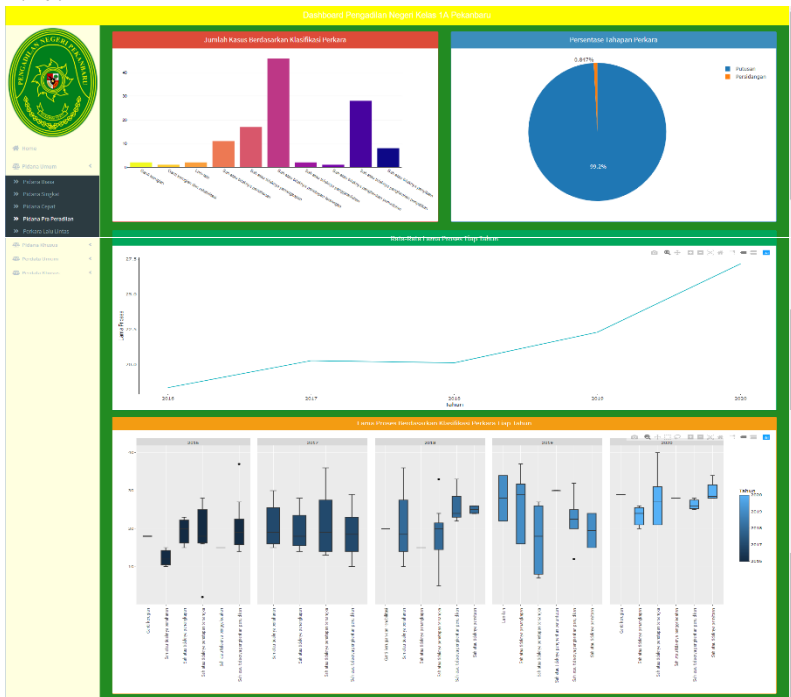
Selanjutnya pada sub menu pidana cepat menampilkan jumlah perkara pidana biasa berdasarkan klasifikasi perkara, persentase tahapan perkara, rata-rata lama proses perkara tiap tahun, dan lama proses pada masing-masing klasifikasi perkara tiap tahunnya. Tampilan sub menu pidana cepat ditunjukkan pada Gambar 4.26.



Gambar 4.26 Tampilan Sub Menu Pidana Cepat.

Berdasarkan Gambar 4.26 dapat dilihat perbandingan jumlah kasus berdasarkan klasifikasi perkara, kemudian dapat melihat persentase tahapan perkara per 1 Juli 2020, dan dibawahnya dapat melihat rata-rata lama proses tiap tahun untuk mengevaluasi waktu proses perkara tiap tahunnya. Selain itu, Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat mengevaluasi dan melihat performa pelayanan perkara pidana cepat pada masing-masing klasifikasi perkara yang ditampilkan pada Gambar 4.26.

Kemudian pada sub menu pidana pra peradilan menampilkan jumlah perkara pidana pra peradilan berdasarkan klasifikasi perkara, persentase tahapan perkara, rata-rata lama proses perkara tiap tahun, dan lama proses berdasarkan klasifikasi perkara tiap tahun. Tampilan sub menu pidana pra peradilan ditunjukkan pada Gambar 4.27.



Gambar 4.27 Tampilan Sub Menu Pidana Pra Peradilan.

Gambar 4.27 menampilkan perbandingan jumlah perkara pada masing-masing klasifikasi perkara, kemudian dapat dilihat persentase tahapan perkara pidana pra peradilan per 1 Juli 2020, dan dapat melihat rata-rata lama proses perkara, sehingga dapat mengetahui tingkat performa pelayanan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat melakukan evaluasi terkait waktu proses pada masing-masing perkara setiap tahunnya berdasarkan *box plot* yang ditampilkan pada Gambar 4.27.

Selanjutnya pada sub menu perkara lalu lintas menampilkan rata-rata perkara lalu lintas tiap tahun dan jumlah sisa perkara tiap tahun. Tampilan sub menu perkara lalu lintas ditunjukkan pada Gambar 4.28.



Gambar 4.28 Tampilan Sub Menu Perkara Lalu Lintas.

Berdasarkan Gambar 4.28 dapat dilihat perbandingan jumlah perkara lalu lintas setiap tahunnya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dan sisa perkara yang belum diselesaikan setiap bulannya. Sehingga Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat melakukan evaluasi terkait pelayanan perkara lalu lintas setiap tahunnya.

4.2.3 Menu Pidana Khusus

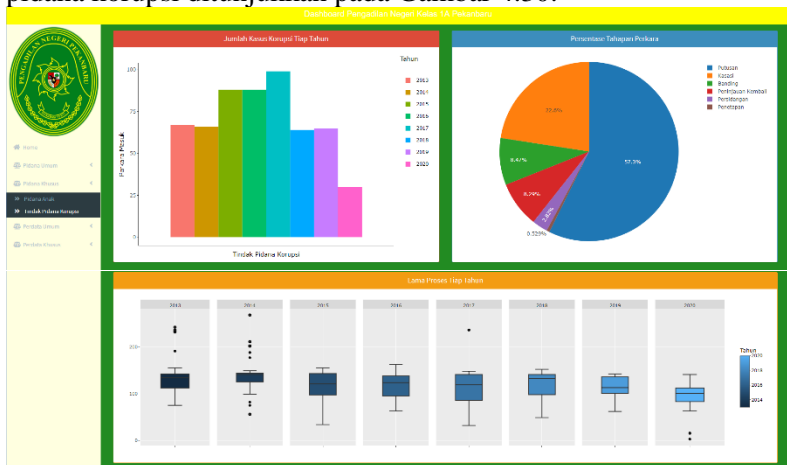
Menu pidana khusus menampilkan 2 sub menu diantaranya ialah pidana anak dan tindak pidana korupsi. Sub menu pidana anak menampilkan jumlah kasus berdasarkan klasifikasi perkara, persentase tahapan perkara, rata-rata lama proses perkara tiap tahun, dan lama proses pada masing-masing klasifikasi perkara tiap tahunnya. Tampilan sub menu pidana anak ditunjukkan pada Gambar 4.29.



Gambar 4. 29 Tampilan Sub Menu Pidana Anak.

Gambar 4.29 menampilkan perbandingan jumlah perkara pidana anak setiap tahunnya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, kemudian dapat dilihat persentase tahapan perkara untuk mengetahui perbandingan perkara yang sudah dalam tahap putusan, dan dapat melihat perbandingan rata-rata lama proses setiap tahunnya untuk dilihat tingkat performa pelayanan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Selain itu, sub menu pidana anak juga menampilkan lama proses pada masing-masing perkara tiap tahun, sehingga Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat mengevaluasi performa pelayanan perkara pidana anak pada masing-masing klasifikasi perkara.

Selanjutnya pada sub menu tindak pidana korupsi menampilkan jumlah kasus korupsi tiap tahun, persentase tahapan perkara, dan lama proses tiap tahun. Tampilan sub menu tindak pidana korupsi ditunjukkan pada Gambar 4.30.



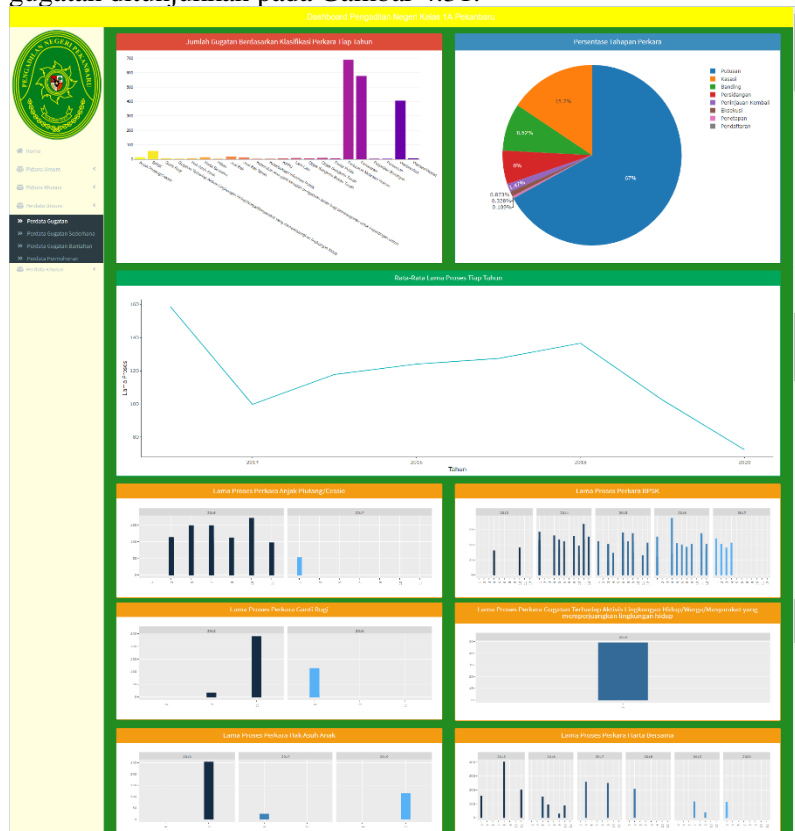
Gambar 4.30 Tampilan Sub Menu Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Gambar 4.30 dapat dilihat perbandingan jumlah perkara tindak pidana korupsi tiap tahunnya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, kemudian dapat melihat persentase perkara tindak pidana korupsi yang sudah dalam tahap putusan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, dan *box plot* lama proses perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A

Pekanbaru tiap tahunnya. Sehingga dapat menjadi evaluasi dan mengetahui tingkat performa pelayanan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.

4.2.4 Menu Perdata Umum

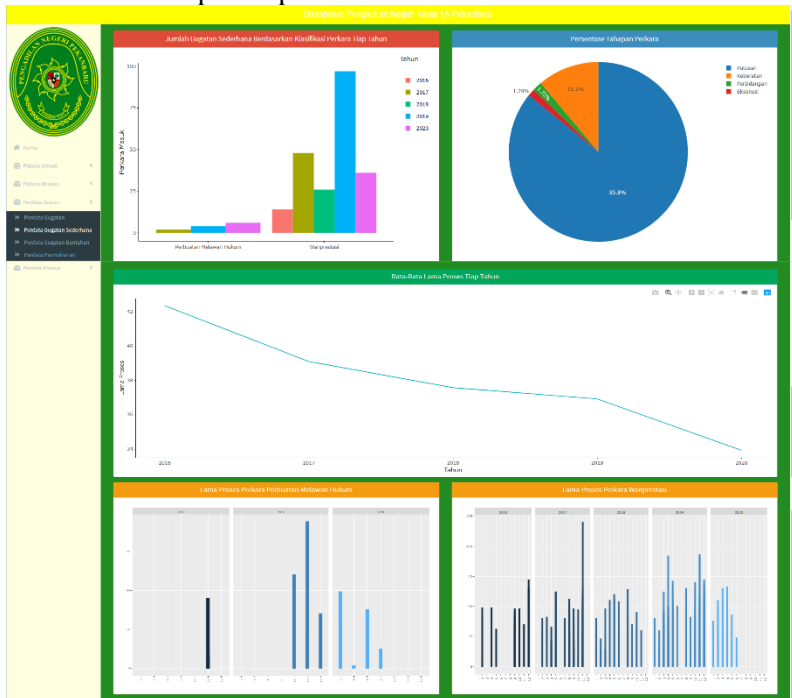
Menu perdata umum menampilkan 4 sub menu diantaranya ialah perdata gugatan, perdata gugatan sederhana, perdata gugatan bantahan, dan perdata permohonan. Tampilan sub menu perdata gugatan ditunjukkan pada Gambar 4.31.



Gambar 4.31 Tampilan Sub Menu Perdata Gugatan.

Berdasarkan Gambar 4.31 dapat dilihat perbandingan jumlah perkara perdata gugatan berdasarkan klasifikasi perkara, kemudian

dapat melihat persentase tahapan perkara, dan mengetahui rata-rata lama proses perdata gugatan tiap tahun. Gambar 4.31 juga menampilkan lama proses perkara tiap tahun berdasarkan klasifikasi perkara, sehingga Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat mengevaluasi dan mengetahui tingkat performa pelayanan perkara perdata gugatan. Selanjutnya tampilan sub menu perdata gugatan sederhana ditampilkan pada Gambar 4.32.



Gambar 4.32 Tampilan Sub Menu Perdata Gugatan Sederhana.

Sub menu perdata gugatan sederhana menampilkan perbandingan jumlah perkara gugatan sederhana berdasarkan klasifikasi perkara tiap tahun, kemudian menunjukkan persentase tahapan perkara perdata gugatan sederhana, dan rata-rata lama proses perkara perdata gugatan sederhana tiap tahun. Selain itu, juga ditampilkan lama proses perkara pada masing-masing perkara. Sehingga dapat menjadi evaluasi bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A

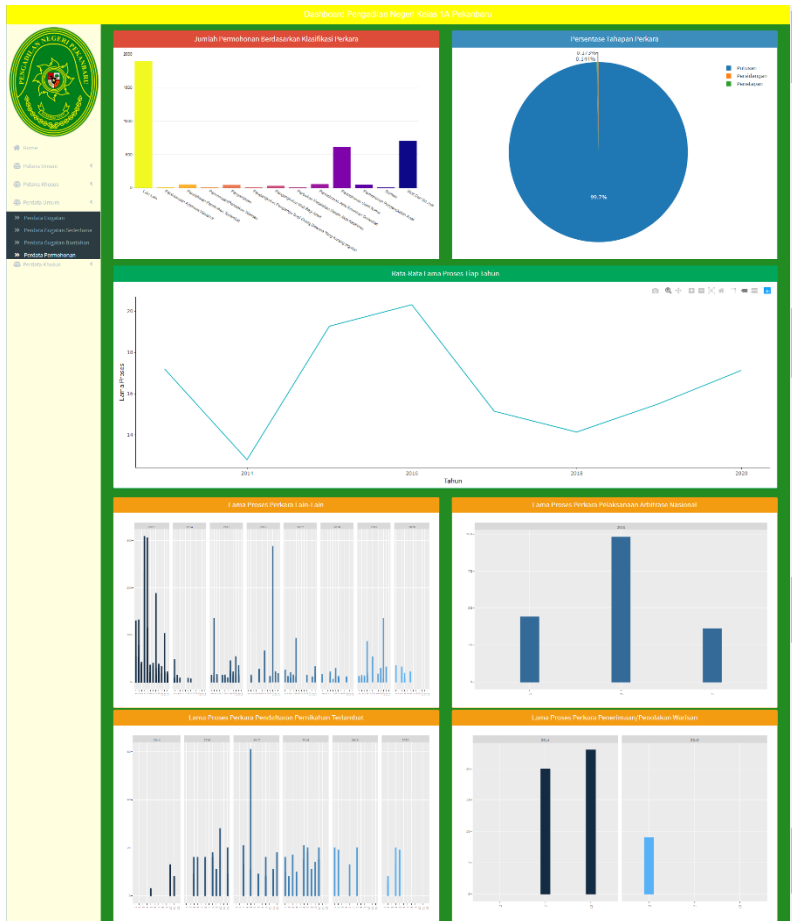
Pekanbaru dalam meningkatkan performa pelayanan perkara perdata gugatan sederhana. Selanjutnya tampilan sub menu perdata gugatan bantahan ditunjukkan pada Gambar 4.33.



Gambar 4.33 Tampilan Sub Menu Perdata Bantahan.

Gambar 4.33 menampilkan perbandingan jumlah perkara perdata gugatan bantahan berdasarkan klasifikasi perkara setiap tahun, kemudian dapat melihat persentase tahapan perkara, dan mengetahui rata-rata lama proses perkara perdata gugatan bantahan

tiap tahun. Gambar 4.33 juga menampilkan lama proses perkara tiap tahun berdasarkan klasifikasi perkara, sehingga Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat mengevaluasi dan mengetahui tingkat performa pelayanan perkara perdata gugatan dan bantahan. Selanjutnya tampilan sub menu perdata permohonan ditampilkan pada Gambar 4.34.



Gambar 4.34 Tampilan Sub Menu Perdata Permohonan.

Sub menu perdata permohonan menampilkan perbandingan jumlah perkara perdata permohonan berdasarkan klasifikasi perkara tiap tahun, kemudian dapat dilihat persentase tahapan perkara perdata permohonan, dan rata-rata lama proses perkara perdata permohonan tiap tahun. Selain itu, juga ditampilkan lama proses perkara pada masing-masing perkara. Sehingga dapat menjadi evaluasi bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam meningkatkan performa pelayanan perkara perdata permohonan.

4.2.5 Menu Perdata Khusus

Menu perdata khusus menampilkan 1 sub menu yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Tampilan sub menu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ditunjukkan pada Gambar 4.35.



Gambar 4.35 Tampilan Sub Menu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Berdasarkan Gambar 4.35 dapat dilihat perbandingan jumlah perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berdasarkan klasifikasi perkara setiap tahun, kemudian dapat melihat persentase tahapan perkara, dan mengetahui rata-rata lama proses perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tiap tahun. Selain itu, Gambar 4.35 juga menampilkan lama proses perkara tiap tahun berdasarkan klasifikasi perkara, sehingga Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dapat mengevaluasi dan mengetahui tingkat performa pelayanan perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan rata-rata waktu proses perkara pada pidana umum, pidana khusus, perdata umum, dan perdata khusus dapat diketahui bahwa performa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara semakin baik, kecuali pada pidana pra peradilan dan perdata permohonan. Nilai variansi waktu proses perkara pada pidana umum, pidana khusus, perdata umum, dan perdata khusus sangat besar, artinya waktu proses pelayanan perkara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru cenderung heterogen.
2. *Dashboard* Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru terdiri atas 5 menu yaitu *home*, pidana umum, pidana khusus, perdata umum, dan perdata khusus. Menu pidana umum terdiri dari 5 sub menu diantaranya ialah pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana pra peradilan, dan perkara lalu lintas. Kemudian pada pidana khusus terdiri dari 2 sub menu diantaranya ialah pidana anak dan tindak pidana korupsi. Selanjutnya pada perdata umum terdapat 4 sub menu diantaranya ialah perdata gugatan, perdata gugatan sederhana, perdata gugatan bantahan, dan perdata permohonan. Sedangkan pada perdata khusus menampilkan 1 sub menu yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Hasil akhir dari pembuatan *dashboard* ini ialah sebagai evaluasi dan informasi terkait performa pelayanan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam menyelesaikan suatu perkara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kerja praktik, Saran yang bisa diberikan ialah bagi Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam hal penyajian data dapat ditingkatkan dengan menggunakan *dashboard*

yang interaktif, salah satunya dengan menggunakan *Shiny R*. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya dapat meningkatkan program *dashboard* yang telah dibuat dengan cara membuat *dashboard* yang dapat secara otomatis berubah ketika data baru ditambahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eckerson, W. 2006. *Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business, Second Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Hariyanti, E. 2008. *Metodologi Pembangunan Dashboard Sebagai Alat Monitoring Kinerja Organisasi Studi Kasus Institut Teknologi Bandung*. Bandung: Magister Informatika Institut Teknologi Bandung.
- Hestianto, N. 2011. *Pengurangan Losses Material pada Proses Pembuatan Open Top Can (OTC) dengan Metode Six Sigma*. Depok: Fakultas Teknik Program Teknik Industri Universitas Indonesia.
- Meo, M Y dkk. 2014. *Pengolahan Data dan Penyajian Data dalam Statistik*. Semarang: Magister Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Pengadilan Negeri Pekanbaru. 2020. *Struktur Organisasi*. Retrieved from Pengadilan Negeri Pekanbaru: <https://www.pn-pekanbaru.go.id>.
- Putra, R E. 2018. *Pengendalian Kualitas Data Atribut dengan Diagram Kontrol Multivariate NP pada Produksi Sepatu di PT Vigano Cipta Perdana*. Jakarta: Teknik Informatika dan Statistika Universitas Bina Nusantara.
- Walpole, R E. 2012. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wijayanto, Y. 2011. *Perancangan Dashboard sebagai Sistem Informasi Monitoring Kinerja Universitas Sebelas Maret*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penerimaan Kerja Praktik.



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PEKANBARU KELAS IA
Jl. Teratai No. 85 Telp. (0761) 24953 - Fax. No. (0761) 22573
PEKANBARU 28127

Website : <http://pn-pekanbaru.go.id>, email : admin@pn-pekanbaru.go.id

Pekanbaru, 24 Juli 2020

N o m o r : W4.U1/510A /KP.01/7/2020

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Kerja Praktik

Kepada Yth :

Sdri. Kepala Departemen

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Di -

Surabaya

Sehubungan dengan Surat dari Saudari Kepala Departemen Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi Sepuluh Nopember perihal Kerja Praktik yakni Nomor : 41386/IT2.1.1.3/PP.05.02/2020 tanggal 09 Juli 2020, an. Muhammad Adlansyah Muda, NRP. 06211740000074, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa nama-namanya tersebut pada prinsipnya kami memberikan izin untuk melakukan Kegiatan Magang di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan rencana jadwal kegiatan yang diminta.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
Sekretaris,














Erry Mardianto, ST., SH
NIP. 19760301 200502 1 001

Lampiran 2. Lembar Kegiatan Kerja Praktik.

	PROGRAM STUDI SI STATISTIKA FSAD-ITS			F-A
	<i>Undergraduate Program Department Of Statistics FSAD -ITS</i>			
	Bukti Kegiatan di Perusahaan <i>Evidence of Activity in the Company</i>			
KP-SI-07	Curriculum 2018 , May 2019 Ed	Revision Number : 01	Code/sks : KS184721 / (0/0/2)	Page :1 of 3

Nama Mahasiswa /Student Name : Muhammad Adlansyah Muda
 NRP/ Student Identity Number : 06211740000074
 Nama Perusahaan/ Company Name : Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru
 Unit Kerja/Work Unit : Panitera Hukum
 Nama Pembimbing / Supervisor Name : Erry Mardianto, ST., SH
 Waktu Kerja Praktek/ Practical Work time : 08.00-16.30 (Senin-Kamis) & 08.00-17.00 (Jumat)
 Waktu Pelaksanaan/ Execution Time : 01 Juli 2020 – 30 Juli 2020

No	Tanggal Date	Waktu /Time		Kegiatan Activity	TT PL /CSS ¹⁾
		Start	Finish		
1	01 Juli 2020	08.00	16.30	1. Memperkenalkan area unit kerja di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. 2. Membahas database yang tersedia di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.	
2	02 Juli 2020	08.00	16.30	1. Memindahkan data perkara ke dalam Microsoft Excel. 2. Menyusun kerangka dashboard untuk tampilan depan (home) dan data pidana umum.	
3	03 Juli 2020	08.00	17.00	1. Membuat dashboard untuk tampilan depan (home). 2. Membuat dashboard untuk data pidana biasa.	
4	06 Juli 2020	08.00	16.30	1. Melanjutkan dashboard untuk data pidana biasa. 2. Diskusi perihal perkara pidana biasa.	
5	07 Juli 2020	08.00	16.30	1. Menyusun kerangka dashboard untuk data pidana singkat. 2. Membuat dashboard untuk data pidana singkat.	
6	08 Juli 2020	08.00	16.30	1. Diskusi perihal perkara pidana singkat dan pidana cepat. 2. Menyusun kerangka dashboard untuk data pidana cepat.	
7	09 Juli 2020	08.00	16.30	1. Membuat dashboard untuk data pidana cepat. 2. Menyusun kerangka dashboard untuk data pidana pra peradilan.	
8	10 Juli 2020	08.00	17.00	1. Membuat dashboard untuk data pidana pra peradilan. 2. Menyusun kerangka dashboard untuk data perkara lalu lintas.	
9	13 Juli 2020	08.00	16.30	1. Membuat dashboard untuk data perkara lalu lintas. 2. Diskusi perihal perkara pidana khusus.	
10	14 Juli 2020	08.00	16.30	1. Menyusun kerangka dashboard untuk data pidana anak. 2. Membuat dashboard untuk data pidana anak.	
11	15 Juli 2020	08.00	16.30	1. Menyusun kerangka dashboard untuk data pidana anak. 2. Membuat dashboard untuk data pidana anak.	

¹⁾ Setiap paraf harus disertai stempel perusahaan/ Each initials must be accompanied by the company stamp
 TTPL= Tanda tangan pembimbing Lapangan/Company Supervisor Signature (CSS)


Form F-A merupakan bukti bahwa mahasiswa telah mengikuti kegiatan di perusahaan tempat KP. Formulir ini dilampirkan di laporan Kerja Praktek sebagai bukti telah melaksanakan Kerja Praktek
 F-A Form is evidence that the student has attended activities at the company of PW. This form is attached in report as evidence has been carrying out Practical Work

Proses pembelajaran di jurusan Statistika- ITS meliputi Lecture, Practical Work (PW) dan Final Project (FP). Ada 11 Dokumen dalam proses Kerja Praktek, yaitu : 1). SOP (D1), 2). Pedoman (D2), 3).Formulir pengisian Surat permohonan KP (F1), 4).Surat permohonan KP di Perusahaan (F2), 5).Surat balasan dari perusahaan (F3), 6).Formulir rekaman kegiatan (F4,F5,F6), 7).Formulir penilaian (F-C,F-D dan F-E).
 The learning process in the Department Statistika- ITS covers Lecture, Practical Work (PW) and Final Project (FP). There are 11 documents in the process of PW, i.e: 1). SOP (D1), 2). Manual (D2), 3). Formulir filing request letter PW (F1), 4). Letter of PW request to the Company (F2), 5). Letter reply from the company (F3), 5). Formulir recording activities (F4, F5, F6), 6). Formulate assessment (F-C, F-D and F-E).

Pekanbaru, 04 Agustus 2020
 Mengetahui
 Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru



 (Saut Maruli Tua Pasaribu, SH., MH)
 NIP. 19661019 199212 1001

D-1	D-2	F-1	F-2	F-3	F-4	F-A	F-B	F-C	F-D	F-E
SOP of PW	Practical Work Request Writing Form	Formulir filing request letter PW	Letter of PW request to the Company	Letter reply the company	PW proposal supervising Form	Activity Form in the Company	PW supervising Form	PW Company Assesment Form	Assesment of Report Form	Poster Assesment form







	PROGRAM STUDI SI STATISTIKA FSAD-ITS <i>Undergraduate Program Department Of Statistics FSAD -ITS</i>			F-A
	Bukti Kegiatan di Perusahaan <i>Evidence of Activity in the Company</i>			
KP-SI-07	Curriculum 2018 , May 2019 Ed	Revision Number : 01	Code/sks : K5184721 / (0/0/2)	Page :2 of 3

Nama Mahasiswa /Student Name NRP/ Student Identity Number Nama Perusahaan/ Company Name Unit Kerja/Work Unit Nama Pembimbing / Supervisor Name Waktu Kerja Praktek/ Practical Work time Waktu Pelaksanaan/ Execution Time	: Muhammad Adliansyah Muda : 0621174000074 : Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru : Panitera Hukum : Erry Mardianto, ST., SH : 08.00-16.30 (Senin-Kamis) & 08.00-17.00 (Jumat) : 01 Juli 2020 – 30 Juli 2020
---	--

No	Tanggal Date	Waktu /Time		Kegiatan Activity	TT PL /CSS ¹⁾
		Start	Finish		
12	16 Juli 2020	08.00	16.30	1. Menyusun kerangka <i>dashboard</i> untuk data tindak pidana korupsi. 2. Membuat kerangka <i>dashboard</i> untuk data tindak pidana korupsi.	<i>af</i>
13	17 Juli 2020	08.00	17.00	1. Mengidentifikasi penyebab data <i>noise</i> pada lama proses perdata gugatan. 2. Melakukan data <i>cleaning</i> dan menyusun kerangka <i>dashboard</i> untuk perdata gugatan.	<i>af</i>
14	20 Juli 2020	08.00	16.30	Membuat <i>dashboard</i> untuk tampilan perdata gugatan.	<i>af</i>
15	21 Juli 2020	08.00	16.30	1. Diskusi perihal perkara perdata gugatan. 2. Menyusun kerangka <i>dashboard</i> untuk perdata gugatan sederhana.	<i>af</i>
16	22 Juli 2020	08.00	16.30	Membuat <i>dashboard</i> untuk tampilan perdata gugatan sederhana.	<i>af</i>
17	23 Juli 2020	08.00	16.30	1. Diskusi perihal perkara perdata gugatan sederhana. 2. Menyusun kerangka <i>dashboard</i> untuk tampilan perdata gugatan bantahan.	<i>af</i>
18	24 Juli 2020	08.00	17.00	Membuat <i>dashboard</i> untuk tampilan perdata gugatan bantahan.	<i>af</i>
19	27 Juli 2020	08.00	16.30	1. Diskusi perihal perdata gugatan bantahan dan perdata permohonan. 2. Menyusun kerangka <i>dashboard</i> untuk tampilan perdata permohonan.	<i>af</i>
20	28 Juli 2020	08.00	16.30	Membuat <i>dashboard</i> untuk tampilan perdata permohonan.	<i>af</i>
21	29 Juli 2020	08.00	16.30	1. Membuat <i>dashboard</i> untuk tampilan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 2. Mengubah tampilan warna dan ukuran grafik, serta mengambil gambar untuk mengganti tampilan depan (<i>home</i>).	<i>af</i>
22	30 Juli 2020	08.00	16.30	Menambahkan grafik rata-rata lama proses tiap tahun pada semua tampilan, kecuali pada perkara lalu lintas dan tindak pidana korupsi.	<i>af</i>

*) Setiap paraf harus disertai stempel perusahaan/ Each initials must be accompanied by the company stamp TTPL= Tanda tangan pembimbing Lapangan/Company Supervisor Signature (CSS)	Pekanbaru, 04 Agustus 2020 Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru											
Form F-A merupakan bukti bahwa mahasiswa telah mengikuti kegiatan di perusahaan tempat KP. Formulir ini dilampirkan di laporan Kerja Praktek sebagai bukti telah melaksanakan Kerja Praktek. F-A Form is evidence that the student has attended activities at the company of PW. This form is attached in report as evidence has been carrying out Practical Work	 (Saut Marjuli Fauz Pasaribu, SH., MH) NIP. 19661019 199212 1001											
Proses pembelajaran di Jurusan Statistika- ITS meliputi Lecture, Practical Work (PW) dan Final Project (FP). Ada 11 Dokumen dalam proses Kerja Praktek, yaitu : 1) SOP (01/2), Pedoman (02), 3)Formulir pengisian Surat permohonan KP (F3), 4)Surat permohonan KP di Perusahaan (F2), 5)Surat balasan dari perusahaan (F5), 6)Formulir rekapitulasi kegiatan (F4,F4/F8), 6)Formulir penilaian (F-C,F-D dan F-E). The learning process in the Department Statistika- ITS covers Lecture, Practical Work (PW) and Final Project (FP). There are 11 documents in the process of PW, ie: 1) SOP (01), 2) Manual (02), 3) Form filling request letter PW (F3), 4) Letter of PW request to the Company (F2), 5) Letter reply from the company (F5), 6) Form filling request letter PW (F4, F4, F8), 6) Form filling assessment (F-C, F-D and F-E).	<table border="1"> <tr> <td>D-1</td><td>D-2</td><td>F-1</td><td>F-2</td><td>F-3</td><td>F-4</td><td>F-A</td><td>F-B</td><td>F-C</td><td>F-D</td><td>F-E</td> </tr> </table>	D-1	D-2	F-1	F-2	F-3	F-4	F-A	F-B	F-C	F-D	F-E
D-1	D-2	F-1	F-2	F-3	F-4	F-A	F-B	F-C	F-D	F-E		

Lampiran 3. Lembar Bimbingan Laporan Kerja Praktik.

	PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA FSAD-ITS <i>Undergraduate Program Department Of Statistics FSAD-ITS</i> Bukti Pembimbingan Kerja Praktik <i>Evidence of Practical Work Supervising</i>	F-B								
KP-S1-08	Curriculum 2018 , May 2019 Ed	Revision Number : 01 Code/sks : KS184721 / (0/0/2)								
Nama Mahasiswa /Student Name : Muhammad Adlansyah Muda NRP/ Student Identity Number : 06211740000074 Nama Perusahaan/ Company Name : Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Unit Kerja/Work Unit : Panitera Hukum Nama Pembimbing / Supervisor Name : Erry Mardianto, ST., SH Waktu Kerja Praktek/ Practical Work time : 08.00-16.30 (Senin-Kamis) & 08.00-17.00 (Jumat)										
No	Tanggal Date	Materi yang dibahas Component Discussions	TT Pembimbing Supervisor Sign							
1	07 Agustus 2020	Bimbingan Bab I laporan kerja praktik dengan hasil sebagai berikut. 1. Memperbaiki kalimat yang kurang berkaitan pada latar belakang laporan kerja praktik. 2. Menambahkan alasan kerja praktik di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dan menyebutkan kontribusi Statistika. 3. Memperbaiki tujuan khusus laporan kerja praktik. 4. Memperbaiki tanda baca pada Bab I laporan kerja praktik. Bimbingan Bab II laporan kerja praktik dengan hasil sebagai berikut. 1. Memperbaiki dan menambahkan keterangan pada Gambar 2.1. 2. Memperbaiki tanda baca dan penulisan pada Bab II.								
2	12 Agustus 2020	Bimbingan Bab III laporan kerja praktik dengan hasil sebagai berikut. 1. Memperbaiki tanda baca dan penulisan pada Bab III. 2. Memperbaiki penulisan sitasi pada Bab III.								
3	19 Agustus 2020	Bimbingan Bab IV laporan kerja praktik dengan hasil sebagai berikut. 1. Memperbaiki penomoran sub Bab IV. 2. Memperbaiki tanda baca dan penulisan pada Bab IV. 3. Memperbaiki penulisan tabel dan gambar, serta menambahkan keterangan tempat dan waktu. 4. Menyusuaikan jumlah desimal pada tabel Bab IV. 5. Menyusuaikan informasi pada gambar sehingga diagram tidak terlalu panjang dan keterangan tidak terlalu kecil. 6. Menambahkan <i>diagnostic analysis</i> pada Bab IV.								
4	21 Agustus 2020	Bimbingan Bab V dan daftar pustaka laporan kerja praktik dengan hasil sebagai berikut. 1. Memperbaiki penulisan sitasi pada daftar pustaka. 2. Memilih sitasi yang paling terbaru apabila terdapat dua sitasi yang sama tetapi berbeda tahun.								
Form-FB merupakan bukti bahwa mahasiswa telah melakukan pembimbingan selama pembuatan Laporan KP. Formulir ini dilampirkan di laporan Kerja Praktek. Bimbingan KP Minimal 5 kali. FB Form is evidence that the student has been supervising for report drafting of PW. This form is attached in PW report. PW guidance least 5 times.		Surabaya, 21 Agustus 2020 Dosen Pembimbing KP/PW Supervisor  (Dr. Achmad Choiruddin, S.Si., M.Sc.) NIP. 19912019 111 01								
Proses pembelajaran di Jurusan Statistika-ITS meliputi Lecture, Practical Work (PW) dan Final Project (FP). Ada 11 Dokumen dalam proses Kerja Praktis, yaitu : 1). SOP (D1), 2). Pedoman (D2), 3). Formulir pengajuan Surat permohonan KP (F1), 4). Surat permohonan KP di Perusahaan (F2), 5). Surat balasan dari perusahaan (F3), 5). Formulir rekaman kegiatan (F4,F5,F6), 6). Formulir penilaian (F-C-F-D dan F-E). The learning process in the Department Statistika-ITS covers Lecture, Practical Work (PW) and Final Project (FP). There are 11 documents in the process of PW, ie: 1). SOP (D1), 2). Manual (D2), 3). Formulir filing request letter (PW F1) 4). Letter of PW request to the Company (F2), 5). Letter reply from the company (F3), 5). Formulir recording activities (F4, F5, F6), 6). Formulir assessment (F-C, F-D and F-E).										
D-1	D-2	F-1	F-2	F-3	F-4	F-A	F-B <input checked="" type="checkbox"/>	F-C	F-D	F-E
SOP of PW	Practical Work Report Writing Form	Formulir filing request letter PW	Letter of PW request to the Company	Letter reply from the company	PW proposal supervising form	Activity form in the Company	PW supervising form	PW Company Assessment form	Assessment of Report form	Poster Assessment form